DENNY J.A.

Visi Indonesia Baru

Setelah Reformasi 1998

LKiS

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hal Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

DENNY J.A.

VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998

LKIS

DENNY J.A

VISI INDONESIA BARU
Setelah Gerakan Reformasi
Denny J.A.

xiv + 122 halaman : 14,5 x 21 cm
1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5237-5

Penyunting Naskah: Fransiskus Surdiasis
Rancang Sampul: Imam Syahirul Alim
Setting/layout : Santo

Penerbit
LKIS Yogyakarta
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Tlp. (0274) 387194/ 7472110
Faks. (0274) 417762

Cetakan I: Agustus 2006

Untuk Tiga Matahari :
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku

Sekapur Sirih
Visi Politik untuk Indonesia Baru

Sebuah ide, ujar John Maynard Keynes, baik ketika ia benar ataupun salah, jauh lebih kuat daripada yang banyak diduga. Berbagai diktator, tiran dan penguasa absolut yang begitu berkuasa, pada dasarnya hanyalah pelaksana dari berbagai ide yang dirumuskan pemikir sebelumnya.

Pertarungan ide atau visi politik, jika berpegang pada argument Keynes, adalah pertarungan yang lebih besar dan strategis daripada pertarungan untuk kepentingan praktis belaka. Tidaklah salah jika dikatakan, setelah gerakan reformasi 1998 yang menjatuhkan Soeharto, perjuangan politik yang sebenarnya justru baru dimulai. Ke mana Indonesia baru ini harus menuju belum selesai dirumuskan dan disepakati. Padahal visi itu yang akan menentukan aturan main atau the rule of the game politik di tanah air.

Setelah gerakan reformasi 1998, aneka visi politik sudah harus diperdebatkan secara public. Peribahasa popular menyatakan, “Biarkan seribu bunga berkembang.” Dalam negara modern, visi politik masyarakat memang tidak tunggal, sebagaimana bunga. Visi itu tidak hanya beragam namun saling bertentangan satu sama lain.

Namun aturan main yang merupakan prosedur kompetisi politik memang harus tunggal. Di negara demokrasi yang sudah mengalami konsolidasi, semua elit

yang berpengaruh sepakat atas aturan main demokrasi. Berbagai visi politik yang beragam dibiarkan saling bergesek, bertarung dan melengkapi dalam bingkai aturan main demokrasi itu.

Buku ini adalah lontaran visi politik yang ingin ditawarkan bagi Indonesia baru paska reformasi 1998. Karena bersifat visioner, dengan sendirinya, ia dipenuhi oleh kerangka normatif tentang sistem yang seharusnya, bukan analisa obyektif tentang kenyataan. Visi yang saya tawarkan adalah politik yang membebaskan, yang bersandar pada filsafat sosial liberalisme. Kebebasan adalah inti dari filsafat social liberalisme. Kebebasan adalah inti dari filsafat liberalisme yang ditawarkan dalam buku ini.

****

Dari manakah tuntutan kebebasan itu berasal? Kita teringat William Wallace di tanah Scotlandia di abad ke-13. Saat itu, negerinya menjadi tanah jajahan kerajaan Inggris di bawah Raja Edward I. Sang Raja dikenal dengan sebutan Longshanks karena kekejamannya. Ia misalnya memberlakukan tradisi Prima Noctes yang mewajibkan pengantin wanita menyerahkan kegadisannya di malam pertama kepada penguasa setempat.

Wallace menjadi legenda karena perlawanannya yang berani dan lihai. Masyarakat yang mendukungnya merasakan, di balik semua gerak-gerik Wallace, ada sejenis enerji yang menyala yang meletupkan perlawanannya: the will to freedom, keinginan bebas,

keinginan membebaskan negerinya. Wallace pun mendapat dukungan luar biasa karena masyarakat skotlandia masa itu merasakan denyut enerji yang sama: the will to freedom.

Setelah perlawanan yang panjang, akhirnya Wallace tertangkap. Ia dihadapkan dua pilihan. Memohon ampun dan menyatakan kesetiaannya kepada Raja Edward I atau menanggapi penyiksaan luar biasa sebelum menuju hukuman mati. Ia memilih mati.

Di atas pentas, di hadapan ribuan massa yang menonton ia disiksa. Tangannya diikat pada kayu yang kokoh. Lalu kakinya diikat ke barisan kuda yang berlari. Badannya menegang dan ia mengerang kesakitan.

Sang hakim memberinya kesempatan terakhir untuk mohon ampun. Massa yang menonton dan dua kawan setianya yang menyamar di kerumunan itu mulai mendesah mengharap Wallace memohon ampun saja. Sebagian mereka, terutama dua kawan baiknya, tidak tahan mendengar lolongan kesakitan yang alang kepalang.

Wallace dalam kondisi yang sekarat mencoba menggerakkan tubuhnya. Sang hakim tersenyum dan mengumumkan bahwa Wallace akan mengatakan sesuatu, akan mohon ampun. Suara keluar begitu kerasnya dari mulut Wallace dan semua merasa tercengang. Yang ia teriakkan, sebelum ajalnya menjemput adalah Freedom!, kebebasan! Setelah itu ia dipancung.

Wallace yang diperankan sangat baik oleh Mel Gibson dalam Braveheart, kita tahu tidak sendiri. Enerji kebebasan tetap hidup baik sebelum ataupun sesudah Wallace. Berbagai kisah kepahlawanan, berbagai kisah kemerdekaan bangsa diawali oleh enerji itu: the will to freedom, kehendak untuk bebas. Dalam agama, ia muncul sebagai spirit untuk lepas dari menghamba berhala dan meninggikan roh manusia ke Tuhan. Dalam jargon sistem sosial, ia diberi label seperti liberalisasi atau demokratisasi.

Sejak Januari 1998, gerakan menuntut kebebasan itu, the will to freedom, sampai pula di Indonesia. Gerakan reformasi yang terutama dimotori oleh mahasiswa menjatuhkan Soeharto, salah seorang terkuat di Asia yang sudah memerintah selama 32 tahun. Begitu kuatnya angin kebebasan itu mengguncang rejim otoriter yang sebelumnya begitu kokoh.

****

Buku ini juga menyerukan spirit itu: membebaskan politik, liberalisasi, dan demokratisasi. Sudah lama saya ingin menulis sebuah buku tentang prinsip demokrasi yang dilatarbelakangi oleh filsafat kebebasan. Namun kurun waktu yang luang untuk sebuah buku itu tidak kunjung datang. Apalagi kemudian saya disibukkan dengan kuliah Public Policy and Administration di University of Pittsburgh dan comparative politics di Ohio State University, Amerika Serikat.

Solusinya, tulisan itu dicicil. Aneka topik yang penting untuk buku itu sudah ditetapkan. Saya tuliskan topik itu satu persatu sekaligus untuk merespon peristiwa politik yang sedang aktual di tanah air. Tulisan itu setiap kali selesai dimuat di media massa, antara lain Kompas, Gatra, Republika, dan Media Indonesia.

Semua artikel ini pertama kali ditulis dalam kurun waktu Februari 1993-Juli 1999. Namun hampir semua tulisan itu kini ditulis ulang agar benang merah visionernya terasa dan tetap aktual untuk menghadapi kondisi paska gerakan reformasi 1998. Berbagai tulisan di mass media itu dimodifikasi dengan memberikan catatan kaki seperlunya sebagai referensi. Catatan kaki itu di samping menjelaskan dari mana sumber data itu didapat, tetapi lebih dimaksudkan untuk menunjukkan referensi apa yang dapat dibaca untuk menelusuri lebih lanjut ide yang dikemukakan.

Kumpulan tulisan itu dibagi ke dalam dua buku. Satu yang lebih bersifat visioner untuk Indonesia paska gerakan reformasi, dengan judul "Visi Indonesia Baru, Setelah Gerakan reformasi 1998". Buku ini sekarang ada di tangan anda. Satu lagi yang lebih bersifat analitis yang merekam seputar gerakan reformasi, dengan judul: "Jatuhnya Suharto dan Transisi ke Demokrasi."Dua buku ini diterbitkan pada saat yang sama.

Buku ini pertama kali diterbitkan pada1999, ketika reformasi masih menjalani tahun pertamanya. Kini, di tahun 2006, demokrasi telah berusia sewindu, 8 tahun. Sebuah fase yang sudah cukup panjang

dalam mengerjakan demokrasi. Meski telah banyak hal diletakkan sebagai dasar, masih banyak catatan yang perlu dirujuk dan upaya yang perlu dilakukan guna terus membangun demokrasi kita. Banyak hal yang disampaikan dalam buku ini belum sepenuhnya terwujud. Hubungan agama dan negara misalnya, belum sepenuhnya dapat dianggap selesai. Hal itulah yang mendorong saya menerbitkan kembali buku ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yang karena banyaknya tidak dapat disebut satu per satu. Buku ini dipersembahkan kepada mereka, seperti William Wallace, yang terus bergerak diilhami oleh the will to freedom.

Jakarta, Agustus 2006

Daftar Isi

BAB 1

MEMILIH POLITIK YANG MEMBEBASKAN

1

Liberalisme untuk Indonesia Baru Paska Gerakan Reformasi 1998

Filsuf ekonomi Milton Friedman masih menyanyikan Let It Be.[1] Ini bukan judul lagu the Beatles yang pernah popular di dalam 60-an, tetapi sebuah filsafat social. Let It Be kata lain dari Laissez-Faire, sebuah sistem sosial yang membebaskan masyarakat, tepatnya individu, mengurus dirinya sendiri, dengan campur tangan pemerintah seminimal mungkin. Filsafat politik ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi fondasi Indonesia Baru paska gerakan reformasi 1998.

Saat itu Friedman baru saja pulang dari Singapura. Ia menyaksikan sendiri ternyata bentuk pemerintahan otoriter namun bersih (benevolent dictatorship) yang mengekang kebebasan, dapat mencapai pertumbuhan

1. Business Week 7 Juni 1993

ekonomi mengagumkan. Namun, bagi Friedman, Hongkong tetap lebih baik dari Singapura. Hongkong mengkombinasikan kebebasan ekonomi dan kebebasan politik, mirip seperti prinsip Let It Be yang digemarinya. Prestasi Hongkong lebih tinggi. Di tahun yang diamatinya, 1992, dengan jumlah populasi sebanyak 5.8 juta, Hongkong mencapai GNP per-kapita sebesar $16.672, sementara Singapura dengan 2.8 juta penduduk memperoleh $15.964.

Friedman memang penganjur gigih liberalisme, sebuah sistem ekonomi politik yang sekarang terus berkembang luas ke seluruh dunia. Liberalisme menjadikan liberalisme ekonomi dan liberalisasi politik sebagai satu kesatuan.

Sebagian penganjur, sebagaimana Friedman memilih liberalisme karena alasan pragmatis, bahwa sistem ini paling menunjang pertumbuhan ekonomi di zaman yang kompleks. Sebagian lagi mengambil liberalisme karena alasan doktrin. Bagi mereka tidak mungkin membicarakan kebebasan dan otonomi individu tanpa liberalisasi ekonomi dan politik.

Liberalisme dapat dipadukan dengan aneka kultur. Di Amerika Serikat, ia dapat dikawinkan dengan kultur sekuler sebagaimana yang dilakukan Partai Demokrat. Ia dapat diwarnai secara kental oleh agama dan tradisi, seperti yang terjadi pada Partai Republik. Ia dapat diwarnai secara kental oleh semangat individualisme,ataupun sebaliknya, semangat komunitarian.

****

Satu alasan yang sering dikemukakan, sistem liberalisme itu tidak cocok dengan kebudayaan nasional di Indonesia. Kebudayaan nasional adalah sebuah dunia tersendiri dan liberalisme adalah dunia yang lain.

Tapi apakah kebudayaan nasional itu? Apakah ia hanya mencakup warisan budaya yang diterima turun temurun dari nenek moyang di wilayah geografis nusantara? Jika ini diterapkan secara konsisten banyak problem muncul.

Sebutlah, komputer dan mesin faxcimile. Dua teknologi ini tidak pernah dikenal oleh nenek moyang kita, dan tidak pernah tumbuh di sini sebelumnya. Namun, dengan mudah kita mengambil dan memanfaatkannya. Bahkan hampir semua ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia modern bukanlah warisan nenek moyang. Dan kita telah mentransfer ilmu pengetahuan itu dan mengajarkannya di berbagai sekolah.

Ataukah kita salah memahami kebudayaan nasional? Bukankah budaya yang tumbuh di tanah air sejak dulu terus berubah serta juga mendapat pengaruh yang besar dari budaya luar? Para antropolog dapat menuliskan panjang lebar tentang kultur penduduk asli di wilayah geografis nusantara ribuan tahun lalu, yang jelas berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang.

Yang pertama datang ke sini adalah kebudayaan India. Ia membawa Ramayana dan Mahabarata, yang banyak mempengaruhi dunia wayang. Kita tahu wayang

kini bagian integral cara hidup orang Jawa. Datang pula agama Islam. Dari agama Islam kita kemudian mengenal Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kini menjadi sila pertama Pancasila. Kebudayaan Barat kemudian masuk melalui kolonialisme. Sistem masyarakat modern seperti lembaga pemilihan umum demokratis yang kita lakukan pertama kali sejak era reformasi 1998, berasal dari sana.

Apa yang kita maksud kebudayaan nasional adalah kombinasi empat dunia itu, kultur penduduk asli, India, agama Islam dan budaya Barat. Tiga diantaranya bukan berasal dari nenek moyang yang tinggal di sini pertama kali.

Sejak awal, kultur di wilayah ini sudah berinteraksi dengan sistem lain di luarnya, yang berbeda, bahkan bertentangan. Kultur India, agama Islam dan budaya Barat, bukan saja berbeda dan memiliki banyak pertentangan dengan kultur penduduk asli, tetapi antar merekapun terjadi perbedaan dan pertentangan di samping ada persamaannya. Kebudayaan nasional, tidak bisa diingkari, tumbuh melalui akulturasi dan saling pengaruh berbagai peradaban tersebut.

Liberalisme sering pula dicap sebagai anak (brainchild) kebudayaan Barat. Karena ia Barat, maka ia bukan bagian dari kultur kita yang Timur. Apa pula kebudayaan Barat itu?

Jika yang dimaksud dengan Barat adalah wilayah geografis Amerika Serikat dan Eropa, Barat pun terus berubah. Di abad pertengahan, Barat masih gelap dengan

kultur yang sangat terbelakang. Di zaman kejayaan Islam di tahun seribu, dunia Barat masih berada dalam situasi Jahiliyah.

Adalah Helenianisme, budaya Yunani yang memperkenalkan rasionalitas pada penduduk di sana. Budaya itu dibawa oleh banyak pemikir Islam, yang menjadi jembatan antara kebudayaan nasional Yunani dengan kultur nenek moyang di wilayah barat sana. Agama samawi, terutama Kristen, datang memperkenalkan adanya spirit dalam diri manusia. Baratpun mulai diwarnai pengertian hidup yang lebih imajinatif, suci dan spiritual yang lebih dari sekadar alam materi. Teknologi Cina seperti teknik percetakan dan persenjataan sederhana masuk dan turut mewarnai Kebudayan Barat.

Budaya Barat juga bukan warisan turun temurun dari nenek moyang yang tinggal di wilayah itu. Ia pengentalan kerja kolektif banyak komunitas, akulturasi banyak peradaban. Ilmu pengetahuan dan liberalisme adalah anak dari kerja kolektif itu. Dapat [2]diklaim, peradaban modern, termasuk liberalisme, merupakan hasil kontribusi dan milik semua manusia.

Istilah “Nasional” dan “Barat” hanya cocok diterapkan untuk wilayah geografis, tetapi tidak untuk

2. Tentang liberalisme, ada beberapa buku yang layak dibaca. Diantaranya: John Gray, Liberalism, Essays in Political Philosophy (London and New York: Routledge, 1990), dan Michael Sandel: Liberalism and it’s Critics (USA: New York University Press, 1984)

budaya. Seperti udara dan air, budaya terus mengalir, saling pengaruh,bahkan dapat menembus pori-pori kecil dari dinding beton proteksi kultural yang dibuat pemerintahan manapun.

****

Berbeda dengan ideologi dunia lain, seperti Facisme dan Komunisme, Liberalisme bertahan lebih lama dan bahkan terus menerus berkembang. Mungkin karena ia berdiri pada asumsi yang realistik tentang manusia. Ia meyakini bahwa setiap individu dimotivasi oleh keinginan perfection. Ini adalah motivasi yang tidak berubah, yang tidak hancur, dan dimiliki oleh seluruh spesies manusia.

Setiap orang ingin menjadi lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Every individual wants to be greater than he was. Filsafat social yang gagal menemukan ini, dan gagal mengakomodasinya akan gugur.

Kriteria "lebih besar" atau "lebih enak" tergantung dari evolusi kesadaran setiap individu. Jika yang paling mengobsesinya adalah kekayaan, maka ia akan terus dimotivasi untuk lebih kaya. Jika yang menguasainya adalah kekuasaan politik, ia akan terus bergerak untuk lebih berkuasa. Jika yang mengobsesinya adalah keimanan dan moralitas, ia akan terus berusaha lebih saleh dan lebih bertakwa.

Bukanlah setiap orang memiliki sidik jarinya sendiri, yang berbeda dengan orang lain? Lebih dari itu, individu dianggap juga memiliki sidik batin dan pikirannya

sendiri yang juga berbeda-beda. Setiap individu adalah sebuah dunia, sebuah universe. Keberagaman dan perbedaan, dengan demikian, adalah unsur tetap alam semesta.

Liberalisme mengelola realitas ini, menjadikannya sokoguru, membiarkannya mengalir. Yang pertama diberikan oleh liberalisme adalah kebebasan. Setiap orang dibebaskan untuk merumuskan keinginannya sendiri dan mencari cara untuk mencapai keinginannya itu. Kebebasan ditemukan sebagai cara yang paling rendah hati untuk menghadapi realitas keberagaman dan perbedaan.

Yang kedua yang diberikan liberalisme adalah persamaan, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama secara hukum dan mendapat kesempatan yang sama (equality before the law, equal opportunity). Namun persamaan yang disediakan adalah persamaan prosedur dan kesempatan bukan persamaan hasil.

Kompetisi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, tetapi tentu saja memberikan hasil yang berbeda bagi setiap peserta. Dalam kompetisi ada yang kalah, ada yang menang. Apapun hasilnya, sejauh prosedur yang digunakan sudah kompetitif, ia dapat dibenarkan secara moral.

Ketidaksamaan hasil (inequality of result) tidak terhindari karena ia konsekuensi dari kebebasan. Setiap individu, katakanlah, bebas memilih profesi sebagai pengusaha atau pendeta. Pengusaha dan pendeta

akan memperoleh materi yang berbeda. Memaksakan sama perolehan materi pengusaha dan pendeta justru bertentangan dengan keadilan. Di samping itu, penghargaan atas materi setiap orang juga berbeda.

Kondisi di atas mengantarkan liberalisme terus kepuncak. Sebutlah sepuluh negara yang paling makmur secara ekonomi, bebas secara politik, bersih pemerintahannya, maju ilmu pengetahuannya dan kaya budayanya. Umumnya mereka menerapkan liberalisme.

Kita perlu merehabilitasi paham liberalisme dan tidak lagi menyebutnya dengan tegang. Dapatkah kita mengambil paham itu semudah kita mengambil alih komputer atau teknik organisasi modern yang juga berasal dari luar? Sebagaimana yang dialami negara lain, Indonesia baru yang akan kita bentuk setelah gerakan reformasi 1998, akan masuk ke dalam peradaban modern dan kemajuan jika sistemnya bertumpu kepada filsafat politik yang membebaskan ini: liberalisme!

2
Kekuatan Kebebasan

Dalam novelnya yang menjadi klasik, Mary Sheley bercerita tentang Frankenstein. Ia nama sebuah makhluk menyerupai manusia yang diciptakan seorang ilmuwan. Di luar dugaan sang ilmuwan, mahkluk Frankenstein yang diciptakannya malah berbalik membunuhnya.

Sebuah pemerintahan, ujar Milton Friedman, dapat menjadi sejenis Frankenstein. Pemerintahan juga barang ciptaan, yang dibuat masyarakat terutama untuk melindungi kebebasan individu dalam masyarakat itu dari kekerasan dan paksaan pihak lainnya. Menyerupai Frankenstein, pemerintahan yang buruk dapat membunuh masyarakat penciptanya, dengan mengekang kebebasan yang justru harus dilindunginya.

****

Mengapa Kebebasan begitu penting? Ia penting tidak hanya bagi negara di Barat sana, namun juga bagi Indonesia Baru yang akan kita bangun setelah gerakan reformasi 1998. Milton Friedman, pemenang hadiah nobel ekonomi itu, punya kisah tentang kebebasan. Dalam bukunya yang terkenal, *Free to choose* [3] ia mencari tahu apa yang menjadi spirit dan kekuatan dasar Amerika Serikat (AS). Kini AS tidak saja menjadi negara yang sangat kuat secara ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, namun juga secara kebudayaan. Berbagai dimensi ini dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah bangsa. Jawaban Friedman sangat menggugah. Keunggulan AS menurutnya karena negeri itu memberi ruang seluas-luasnya kepada kebebasan.

Para imigran yang datang ke tanah AS di awal kelahiran bangsa ini, bukanlah para pencari tambang emas. Mereka adalah pelarian yang ingin menghindar dari tiran politik dan agama di negerinya masing-masing. Mereka sangat sensitif dengan cara pemerintahan otoriter yang telah membuat mereka terusir dari negerinya. Di tanah yang baru, di AS itu, mereka ingin membangun negeri dengan satu acuan: bagaimana membuat sistem pemerintahan yang melindungi kebebasan warganya.

Bagaimana menghindar dari terbentuknya sentralisasi kekuasaan yang besar? Bukankah kekuasaan yang tidak terkontrol, yang dapat digunakan untuk menciptakan kebaikan, dapat pula digunakan buat kejahatan.

---

3. Milton and Rose Friedman, Free to Choose, A Personel Statement (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990), bagian Introduction, hal. 1-8

Menurut Friedman, ada dua dokumen yang membantu bangsa ini membangun sistem yang bebas itu. Keduanya, terbit di tahun 1776. Satu berjudul: The Wealth of Nations yang dikarang Adam Smith. Satu lagi Declaration of Independence, yang disusun oleh Thomas Jefferson. Dua dokumen ini pada dasarnya merupakan argument intelektual tentang kebebasan.

The Wealth of Nations menelurkan kebebasan individu dalam berekonomi yang kemudian menjadi dasar dari revolusi kapitalisme sampai saat ini. Individu harus dibebaskan membuat kontrak dengan individu lain secara sukarela (voluntary exchange). Kebebasan sukarela ini adalah satu-satunya jaminan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mendapatkan keuntungan dari kontrak itu. Semakin banyak kontrak yang terjadi di masyarakat, semakin banyak individu yang diuntungkan. Semakin banyak individu yang diuntungkan, semakin tinggi keuntungan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sistem seperti ini, fungsi pemerintah sangat minimal. Pemerintah harus membiarkan masyarakat mengatur ekonominya sendiri, dan hanya terlibat jika diperlukan, misalnya ada pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak itu karena ditipu. Dalam ekonomi klasik, pemerintah dibutuhkan hanya dalam kasus gagalnya mekanisme pasar (market failure) seperti untuk mencegah monopoli, eksternalities, menyediakan public good, perfect information dan membuat hukum.

Sedangkan Declaration of Independence menjustifikasi kebebasan individu untuk memilih sistem nilai uang dan way of life-nya sendiri. Ia menelurkan prinsip bahwa setiap orang dilahirkan secara equal dan memiliki hak langsung dari penciptanya, yang tidak dapat diambil oleh pihak lain, seperti hak atas hidup, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan. Cara mengekspresikan hak itu diserahkan kepada individu masing-masing, sejauh ia tidak melanggar kebebasan pihak lainnya.

Berbagai individu itu lalu bergabung membentuk pemerintahan untuk melindungi kebebasan. Konstitusi dan hukum dibuat agar kebebasan individu dijaga baik dari ancaman individu lain ataupun dari kesewenangan pemerintah. Karena pemerintah disepakati sebagai satu-satunya institusi yang berhak menggunakan kekerasan, maka control terhadap pemerintah itu ekstra ketat. Konstitusi dibuat pada dasarnya agar masyarakat mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya.

Dalam hal terjadinya konflik kepentingan akibat adanya kebebasan, dibentuk pengadilan yang netral dan mandiri. Pengadilan dibuat berada di luar jangkauan pemerintah (eksekutif dan legislatif) karena pemerintah juga aktor yang bermain dalam politik, yang juga dapat melakukan kesalahan.

Untuk mengelola kebebasan, wasit dari sistem politik modern (yang melindungi individu dari paksaan) adalah pengadilan, bukan pihak eksekutif.

Sekali pihak eksekutif diberikan otoritas untuk mengurangi kebebasan masyarakat (seperti pembredelan), membuka kemungkinan ia akan menggunakan hak itu secara salah, karena pihak eksekutif juga terlibat dalam kepentingan politik praktis. Memberikan hak itu hanya kepada pengadilan adalah cara terbaik menghindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu adalah mekanisme untuk memisahkan kekuasaan dari wajah buruknya.

****

Dimanakah letak kekuatan dari kebebasan itu? Dalam situasi bebas, setiap individu dimungkinkan untuk memaksimalkan pencapaiannya (self achievement) sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jika setiap individu mendapat hasil maksimal, masyarakat pun akan memperoleh kemajuan puncak.

Dalam kebebasan, setiap individu mempunyai ruang gerak yang luas untuk melakukan eksperimen, berkompetisi, melakukan petualangan, sejauh ia tidak melanggar kebebasan pihak lain dan terjaring oleh hukum kriminal. Tingginya pencapaian negara bebas seperti negara industri di Barat dan hancurnya Negara yang paling tidak bebas seperti negara komunis, dapat menjadi bukti yang baik bagi kekuatan kebebasan ini.

Kebebasan membuat kita terhindar dari sentralisasi kekuasaan yang memanipulasi publik. Di Negara yang tidak bebas, berkembang aneka ketertutupan, korupsi dan penyelewengan kekayaan publik oleh para birokrat

dan koneksinya. Birokrasi tidak terkontrol dan dengan mudah menjadi sejenis Frankenstein yang dapat membunuh masyarakat yang melahirkannya sendiri.

Keuntungan sistem yang bebas, ia membuat ruang publik menjadi rumah kaca yang dapat diamati dan dikontrol oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sistem ini lebih peka dan mudah mendeteksi manipulasi secara dini. Pemerintahan yang bersih hanya mungkin tumbuh jika ia berada di rumah kaca. Pers salah satu mikroskop kita untuk meneropong rumah kaca itu. Sekali terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh sebuah kelompok atau aktor politik tertentu, situasi bebas itu secara otomatis membuat kepentingan dan aktor politik yang lain mengadakan reaksi. Terbentuklah suatu sistem yang self-correcting.

Apakah kebebasan seperti ini menimbulkan anarki dan keguncangan? Justru kebebasan inilah yang sangat stabil dan kestabilan yang dihasilkan itu bukan direkayasa tetapi spontan (spontaneous order), yaitu jika hukum tegak menjadi aturan main yang berwibawa dan ditaati. Yang supreme kemudian bukan lagi orang perorang, tetapi hukum yang impersonal. Seorang presiden seperti Nixon dapat terjungkal jika ia keluar dari aturan main. Sedangkan hukum itu sendiri hanyalah asas legal dari kebebasan dan persamaan kesempatan bagi semua warga(equal opportunity).

Stabilitas yang berdiri pada prinsip ini akan membiarkan keberagaman pandangan dan aspirasi warganya; membebaskan berbagai kelompok warga

menyusun kekuatan dan menyebarkan keyakinan politiknya. Namun ia akan berlaku tegas bagi siapapun yang melakukan kekerasan dari paksaan. Ia menjadi cermin semurni-murninya kecenderungan warga yang hidup di dalamnya. Masyarakat tumbuh secara spontan, bebas bergerak ke banyak arah, dinamik dan bersinergi yang menghasilkan letupan besar kemajuan, tanpa dikendalikan oleh kekuatan politik yang tersentral.

Indonesia baru yang hendak kita bangun setelah gerakan reformasi 1998 adalah ibarat bunga yang mesti kita tumbuhkan di tanah kebebasan. Dalam kultur kebebasan itu, letupan energi setiap individu untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing, akan saling bergesek dan menghasilkan pencapaian kolektif yang jauh lebih cepat.

3
Evolusi Liberalisme

Semua unsur dalam alam semesta, ujar Fritjof Capra, berubah, tumbuh, dan bergerak seperti tarian Siva. Tak ada yang diam statis. Dunia pemikiran tidak luput pula dari pertumbuhan itu. Berbagai ideologi besar terus menyempurnakan diri, memenuhi kebutuhan baru ataupun harapan lama yang beluum terjangkau.

Ideologi liberalisme sudah tumbuh ratusan tahun. Sejarah mencatat perubahannya di berbagai tahap waktu. Ada beberapa varian yang kini dikenal. Ada pergeseran nilai liberalisme di beberapa tahap sejarah, yang bukan saja berbeda tetapi bertentangan satu sama lain.

Kultur lama Indonesia, baik di masa Orde Baru dan Orde Lama, mengembangkan sikap yang bermusuhan

dan waspada atas paham liberalisme. Namun liberalisme varian yang mana, dan di tahap sejarah yang kapan, yang perlu diwaspadai itu? Dan bukankah produk dari liberalisme itu adalah negara Barat yang sekarang ini paling maju, secara ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan kebersihan pemerintahannya? Mengapa liberalisme yang sudah membuktikan prestasinya dalam dunia nyata itu malah harus diwaspadai?

****

Waktu merubah banyak hal. Ia juga merubah isi dan kandungan ideologi walau nama dan label ideologi itu tetap sama. Berbagai konsep dasar dalam politik mengalami pergeseran makna.

Sebut saja perubahan arti kata ideologi. Karl Marx (1818-1883) mengartikan ideologi sebagai kesadaran palsu yang digunakan penguasa untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Melalui ideologi, kelompok yang dirugikan dapat tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi, bahkan turut memberi legitimasi atas situasi yang sebenarnya merugikan mereka. Ideologi berkonotasi negatif karena ia mendistorsikan kesadaran.

Namun pihak lain yang tidak menyetujui program ekonomi politik Karl Marx, menuduh ajarannya (Marxisme) juga sebagai ideologi, sebagai kesadaran palsu. Lalu yang manakah yang tidak palsu? Siapa penentunya? Ideologi akhirnya mengalami pergeseran makna. Karena setiap kesadaran dapat dicap sebagai ideologi, kini ideologi tidak lagi diartikan sebagai

kesadaran palsu, ia diberi status baru, sebagai platform politik sebuah kelompok masyarakat. Ideologi berubah berkonotasi positif.

Pada tahap ini, ideologi masih hanya berbentuk sebuah grand design masyarakat yang terpadu. Liberalisme dan Marxisme adalah dua contoh ideologi dalam pengertian ini. Di dalamnya terdapat baik sistem ekonomi ataupun sistem politik sebagai satu kesatuan.

Pengertian ideologi berubah lagi. Ia tidak hanya ditunjukan kepada grand design ekonomi politik, tetapi juga sistem simbol yang memiliki fungsi integrasi. Kitapun menyebut ideologi Pancasila. Walau di dalam Pancasila, belum terumuskan sistem ekonomi dan politik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain, tetapi sudah berfungsi sebagai sistem simbol yang dapat mengintegrasikan sebuah komunitas.

Seperti halnya ideologi, pengertian kapitalisme juga berubah. Pada awal kelahirannya di masa revolusi industri abad ke-18, kapitalisme merujuk pada sistem ekonomi politik yang memisahkan secara ketat pemilik modal dan buruh. Pemilik modal berfungsi sebagai pengelola dan penentu jalannya perusahaan dengan mengambil nilai lebih dan mengeksploitasi buruh.

Namun dengan berkembangnya kelas menengah dan lahirnya para manajer, kapitalisme mengalami perubahan yang significant. Pengelola dan pemilih strategi perusahaan tidak lagi ditangani oleh pemilik modal, tetapi oleh sebagian buruh itu sendiri yang sudah

berubah posisi menjadi manajer karena pendidikannya. Terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola. Revolusi manajer membuat jarak antara pemilik modal dan buruh tidak sedalam sebelumnya.

Kini kapitalisme berubah menjadi kapitalisme populer. Pemilik modal tidak lagi dimiliki secara tunggal oleh pengusaha pendiri perusahaan itu. Melalui bursa saham, para buruh dan masyarakat dapat pula menjadi bagian pemilik modal perusahaan itu. Dalam kapitalisme populer, buruh menjadi salah satu pemilik perusahaannya.

Kasus di atas cukup ilustratif. Betapa label sebuah sistem itu tetap sama: Kapitalisme. Namun kandungan dalam pengertiannya sudah berbeda di beberapa tahap sejarah.

****

Liberalisme terkena pula pergeseran makna. Dapat kita sebut, pendiri awal paham ini di bidang ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790), di bidang politik dan paham agama adalah John Locke (1632-1704). Paham ini beranggapan bahwa kebebasan individual adalah nilai tertinggi dalam kehidupan social. Setiap individu itu harus dibiarkan memburu nilai dan kepentingannya, sejauh ia tidak melanggar kebebasan orang lain, tidak melakukan kekerasan dan paksaan.

Peran pemerintah dan agama di dalam liberalisme awal sangat minimal. Negara hanya boleh terlibat di bidang yang tidak dapat dilakukan masyarakat secara

individual, seperti menjaga keamanan dan membuat hukum untuk melindungi kebebasan individual. Agama disingkirkan dari dunia publik, dan dijadikan persoalan pribadi semata.

Dengan hadirnya Great Depression di tahun tiga puluhan dan hadirnya Keynes (1883-1946), liberalism menghasilkan varian baru. Sikap non-intervensi pemerintah di dunia ekonomi dianggap gagal dan menjadi penyebab Great Depression itu. Keynes mengenalkan prinsip keterlibatan pemerintah, yang kini berkembang menjadi ekonomi makro.

Lalu paham ini berkembang menjadi prinsip welfare state. Bagi prinsip ini, bukan kebebasan yang menjadi nilai tertinggi kehidupan, tetapi keadilan. Mekanisme pasar semata tidak dapat membuahkan keadilan karena ia mengarahkan resources yang ada ke tangan pihak yang paling efisien. Dan kelompok yang efisien ini hanya segelintir jumlahnya. Orang miskin yang banyak itu punya hambatan untuk efisien. Keadilan, karenanya, selalu menghendaki keterlibatan pemerintah untuk membantu kaum miskin melalui welfare program dan sistem perpajakan.

Friedrich A Von Hayek dan Milton Friedman mengkritik keras liberalisme versi welfare state ini dan kembali mempopulerkan liberalisme awal. Pemerintah bagi mereka bukan solusi tetapi problem. Jika pemerintah dibiarkan terlibat dalam mekanisme pasar di luar kasus market failure, ekonomi justru menjadi semakin buruk.

Lalu bagaimana dengan kaum miskin, jika pemerintah tidak dibolehkan turut campur? untuk menolong mereka, pemerintah tetap menggunakan uang masyarakat. Mengapa masyarakat itu tidak secara langsung memberi bantuan kepada kaum miskin, tanpa harus menggunakan tangan pemerintah. keterlibatan pemerintah justru membuat bantuan tidak efisien, karena uang itu digunakan juga untuk membayar gaji birokrasi, belum lagi korupsi yang mungkin terjadi.

Masyarakat hanya mungkin membantu dengan basis sukarela. Agama yang mengajarkan hidup bersedekah dan saling tolong sangat sesuai dengan kerangka liberalisme baru (neo-conservatism). Tak heran jika liberalisme varian ini banyak melakukan kerja sama dengan kelompok agama. Liberalisme awal yang sebelumnya sinis pada agama, kini malah berkolaborasi.

Di AS, liberalisme versi welfare state menjadi platform partai demokrat. Mereka sangat peduli dengan kaum the have not dan menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar. Sedangkan liberalisme baru (neo-conservatism) menjadi platform partai republic[4]. Mereka sangat peduli dengan mekanisme pasar dan kehidupan agama. Kedua liberalisme ini tetap disatukan oleh penghargaan yang sangat tinggi kepada rule of law dan demokrasi.

****

4 Debat antara welfare state dan conservatism antara equity dan efissien serta kebebasan, dalam public policy, dapat dibaca: Deborah A. Stone: Policy Paradox and Political Reason (USA: Harpers Collins, 1988).

Ketika rezim Orde Baru dan Orde Lama ingin mewaspadai liberalisme, varian manakah yang dimaksud dan mengapa? Jika komunisme ingin diwaspadai, itu lumrah mengingat semua negara komunis kini sudah dan tengah berada di ambang kehancuran. Sedangkan liberalisme justru membawa negaranya di puncak kejayaan seperti ditunjukkan oleh negara AS dan Eropa.

Jika tidak suka liberalisme karena kegagalan demokrasi liberal dalam sejarah kita, itu harus tetap dikaji kritis. Penyebab kegagalan itu apakah liberalisme an sich atau justru karena sebab lainnya[5].

Jika kita menolak liberalisme karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan nasional, alasan ini semakin runyam lagi. Bukankah seluruh peradaban yang muncul dalam sejarah adalah milik semua manusia, milik semua negara nasional?

Semua puncak peradaban dunia, termasuk liberalisme, harus kita anggap sebagai bagian dari kebudayaan nasional, yang dapat kita ambil, jika memang membawa kebaikan. Indonesia baru yang ingin kita bangun setelah gerakan reformasi 1998, jangan lagi

5 Ulf Sundhausen membuat studi yang komprehensif tentang kegagalan demokrasi parlementer. Ia mengutip berbagai peneliti yang antara lain berpendapat, kegagalan itu disebabkan kalahnya politisi bertipe administrative atas politisi bertipe solidarity makers, atau akibat keterlibatan berbagai kekuatan politik yang tidak punya peran dalam sistem itu. Baca: Ulf Sundhausen, "Indonesia: Past and Present Encounters with Democracy", dalam Larry Diamond, et.al Democracy in Developing Countries, Asia, Volume3, (USA: Lynne Rinner Inc, 1978) hal. 423-474).

mengulangi kesalahan Orde Lama ataupun Orde Baru, yang mengembangkan perasaan takut dan waspada atas ideologi dunia yang terus membuktikan keunggulannya, liberalisme.

4
Mengakhiri Pemujaan Negara

Jangan tanya apa yang dapat negara berikan kepadamu, ujar Presiden John F. Kennedy, tetapi tanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada Negara[6]. Di tanah air, kita pun mendengar ungkapan yang serupa. Dalam satu lagu mars, yang sejak kecil kita nyanyikan dalam upacara, komitmen pada negara itu terus dipompakan ke dalam kesadaran kita: Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami.

Apakah negara telah menjadi sesembahan baru, telah berubah menjadi sejenis dewa modern. Dan kita para manusia lalu memujanya, memberikan jiwa raga? Negara ujar Milton Friedman yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, telah bermetamorfosis justru menjadi

6 Milton Friedman : Freedom and Capitalism (USA: Univ. of Chicago, 1982; hal 1-6).

pusat orientasi dimana masyarakat harus mengabdikan diri. Negara telah disakralkan. Bukan negara untuk masyarakat, tetapi msyarakat untuk Negara.

Distrosi dapat berlangsung lebih dalam. Negara diidentikkan pula dengan pemerintahan. Mengkritik sebuah kebijakan pemerintah dianggap menyerang negara. Mengambil jarak dari sebuah rezim dikira mengurangi kecintaan atas ibu pertiwi. Berbeda pandangan dengan pemerintah menjadi tabu.

****

Dua kasus yang terjadi di negeri seberang, AS, di decade sembilan puluhan, mungkin baik untuk dijadikan renungan. Kasus ini berilustrasi tentang perbedaan sikap pemerintah dan sekelompok warganya, yang semata diakibatkan oeh perbedaan perspektif yang digunakan.

Kasus pertama, perbedaan politik antara pemerintahan Bill Clinton dan para ahli ekonomi. Dalam agenda, Presiden Bill Clinton akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Marihio Hosokawa pada tanggal 11 Februari 1994. Clinton ingin membujuk Jepang agar melakukan hubungan dagang kedua negara yang lebih direncanakan (managed trade). Selama ini Jepang dianggap mengimpor barang Amerika Serikat terlalu sedikit.

Yang mengejutkan, sekitar empat bulan sebelum pertemuan itu, tepatnya pada 4 Oktober 1993, 50 para ahli ekonomi ternama termasuk lima pemegang nobel

melayangkan surat kepada kedua kepala pemerintahan itu. Penandatangan surat itu antara lain, Paul Krugman, Paul Samuelson, Jagdis Bhagawati dan Robert Solow. Pesannya, agar Hosokawa berkata tidak (say no) kepada Clinton. Dunia, ujar para ahli ekonomi ini memerlukan perdagangan bebas yang berdasarkan pasar yang diatur oleh perjanjian internasional, bukan oleh target yang ditentukan para birokrat dan politisi.

Yang dominan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Gedung Putih adalah para ahli hukum dan ahli politik, bukan para ekonom. Mereka mempunyai cara pandang yang sama sekali berbeda dengan umumnya ekonom. Mereka melihat perdagangan internasional sebagai persaingan menang dan kalah, seperti dalam zero-sum game. Istilah seperti trade wars pun muncul.

Para ekonom mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda. Kerjasama yang saling menguntungkan selalu mungkin terjadi dalam perdagangan internasional itu. Dan mekanisme pasar bebas (free trade) akan lebih menguntungkan berbagai negara yang terlibat. Maka 50 para ahli ekonomi yang sangat dihormati di dunianya, yang sebagian besar adalah warga Negara AS, memberi usul kepada kepala pemerintahan negara lain agar menolak proposal presiden mereka sendiri. Para ekonom menentang presiden mereka sendiri dan mengajak kepala pemerintahan lain untuk bersekutu.[7]

---

7. Surat para ekonom ini sebagian dimuat di Far Eastern Economic Review, 4 November 1994, hal. 126

Kasus kedua adalah konflik antara administrasi Clinton dan oposisi. Di tahun 1993, Presiden Clinton mengkampanyekan NAFTA (North American Free Trade Agreement). Adapun tujuan kebijakan ini untuk meliberalisasikan (free trade) hubungan dagang antara USA, Canada dan Mexico. Liberalisasi ini diasumsikan akan menguntungkan Negara anggota. Jagdish Bhagawati misalnya berpendapat NAFTA menandai perubahan yang sangat berarti bagi US policy: "a departure from our traditional philosophy of ex-clusive attachment to multilateralism established after World War II"

Namun kali ini yang menjadi penentang Clinton adalah politisi yang merakyat: Ross Perot. Ia melakukan rally kampanye anti NAFTA, menggalang massa, membeli jam siaran televisi. Mexico dianggap negara yang sangat lemah dalam menerapkan hukum lingkungan hidup dan upah buruh. Liberalisasi ini hanya membuat berbagai perusahaan USA pindah ke sana karena tidak harus berurusan dengan berbagai kompensasi lingkungan hidup serta harga buruhpun murah. Kelompok buruh di USA akan terkena dampaknya.

Ross Perot membuat program terencana, dengan dukungan dana yang besar, untuk mendiskualifikasi program presidennya sendiri. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mendukung program Presiden Clinton. Ujung dari kompetisi ini adalah debat terbuka antara Ross Perot dan Wakil Presiden Al Gore dalam acara Larry King Live CNN 9 November 1993.

****

Perbedaan pendapat di atas, bahkan boikot para ahli ekonomi AS, yang mengajak kepala pemerintahan negara lain, untuk tidak mendukung program presiden mereka sendiri, dianggap biasa. Hal ini tidak dikait-kaitkan dengan patriotisme atau nasionalisme. Kritik atas pilihan atau hasil sebuah kebijakan pemerintah memang tidak bersangkut paut dengan rasa cinta atas ibu pertiwi.

Mengapa pula harus ada kecenderungan menyeragamkan opini? Dalam teori public policy, dikenal apa yang disebut baunded rationality. Pikiran manusia terbatas dan masyarakat begitu kompleksnya. Dalam dunia nyata, tidak tersedia informasi yang lengkap yang dapat membuat kita mengetahui realitas secara sempurna. Kita tidak dapat pula mengetahui efek sebuah policy secara total (total consequences) dalam jangka panjang. Realitas yang kita pahami tergantung dari perspektif yang kita gunakan. Perspektif yang berbeda akan melahirkan gambaran kenyataan yang berbeda pula.

Sikap terhadap sebuah policy tergantung dari model berpikir "kaca mata" atau paradigma yang digunakan. Nilai sebuah policy menjadi relatif. Baik dan buruk subsidi bagi kaum miskin, sebagai misal, tergantung dari visi politik yang diyakini. Jika pasar bebas dan peran pemerintah yang minimal yang diyakini, subsidi menjadi negatif. Namun jika yang diyakini adalah pemerintah yang lebih berperan atas distribusi pendapatan, subsidi menjadi positif. Sikap yang berbeda atas sebuah policy sangatlah logis.

Ada pula alasan moral, yaitu equal opportunity. Jika sebuah perspektif (dan pendukungnya) diberikan tempat untuk bersuara, perspektif lain (dan pendukungnya) harus juga diberikan tempat yang sama. Karena Negara itu dibuat untuk semua warga tanpa diskriminasi, mereka harus diperlakukan secara sama pula. Dalam situasi yang equal inilah rasa keadilan dapat dijaga.

Berbagai pihak dibolehkan menjajakan perspektif masing-masing yang berbeda bahkan kadang saling bertentangan itu. Mereka boleh menggunakan berbagai saluran informasi yang tersedia. Walau sebuah kebijakan resmi sudah diputuskan, mereka yang meyakini perspektif yang berbeda, tetap dibolehkan menyuarakan visi mereka sendiri, sejauh tidak melakukan pemaksaan dan tindakan yang dapat dianggap sebagai kriminal. Jika yang mendukung kebijakan pemerintah mempunyai saluran bagi penyampaian pandangannya, yang bersikap kritis atas kebijakan itu dibolehkan pula mencari salurannya sendiri.

Bukankah akan ada pula mutual adjustment? Dengan membiarkan setiap kepentingan menyuarakan perspektif mereka masing-masing akan terbentuk situasi yang dinamik. Berbagai perspektif itu akan saling mempengaruhi diri satu sama lain. Masing-masing pihak akan terinformasi mengenai kepentingan pihak lainnya, dan diberikan kesempatan untuk saling menyesuaikan diri. Seandainya ada sebuah perspektif yang terlalu menguntungkan kelompok tertentu, dengan segera ia terkoreksi untuk lebih mengakomodasi kepentingan pihak lain.

Mutual adjustment ini sangat kondusif bagi lahirnya kebijakan yang membuat banyak pihak merasa terwakili (win-win outcome). Semua menjadi pengawas satu sama lain. Perspektif yang berbeda itu dibiarkan tumbuh karena memberi efek baik bagi sistem yang self-correcting. Dengan adanya sikap kritis atas kebijakannya, pemerintah semakin tertuntut untuk mengakomodasi kepentingan kelompok yang dirugikan.

****

Negara terlebih lagi sebuah pemerintahan, memang tidak berada dalam jajaran dewa. Ia tidak menjadi sasaran untuk dipuja. Karena negara dan pemerintahan itu dibentuk oleh masyarakat, maka semua individu dalam masyarakat itu memiliki hak untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan evaluasinya.

Menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah, baik di dalam ataupun luar negeri, adalah bagian dari hak itu. Namun tentu saja, siapapun yang menggunakan data dan informasi yang salah dalam rangka mengkritik, terlebih lagi dalam rangka melakukan pembunuhan citra politik (political assas-sination), harus dikenakan sanksi. Jatuhnya sanksi itu bukan karena kritik itu, juga bukan karena ia disampaikan di luar negeri, tetapi karena kesalahan informasi dan data yang digunakan.

Tidakkah dalam kitab suci dinyatakan, manusialah yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi, bukan negara, bukan pula sebuah pemerintahan? Indonesia baru paska gerakan reformasi mesti bersikap murtad atas pemujaan negara. Bukan negara tetapi individulah yang penting.

5

Pentingnya Civil Society

Patung Felix Dzerzhinsky, pendiri pusat intelijen Uni Soviet, sudah dirobohkan. Massa di Moskow yang marah dan bersemangat menyerbu Lubyanka, markas besar intelijen. Tanpa dikomando, mereka menyerang patung itu dengan linggis, pahat dan yel.

Kini sepuluh tahun setelah peristiwa tersebut, yang membubarkan Uni Soviet, masyarakat di sana masih terus bergolak. Di banyak negara eks komunis di Eropa Timur, pergolakan dan konflik internal yang keras juga terjadi. Mengapa sebuah bangsa susah berubah, sulit menjadi demokratis dan tumbuh bersama?

Sebuah bangsa, menurut Larry Diamond, akan kesulitan tumbuh dan menjadi demokratis tanpa kehadiran civil society. Peran pemerintah di negara

eks komunis yang terlalu dominan, mencampuri dan mengekang, membuat masyarakat lumpuh secara politik. Sedangkan masyarakat yang lumpuh yang tidak terbiasa dengan kebebasan akan susah berinisiatif dan tidak terbiasa pula memecahkan masalah bersama. Mengapa civil society? Mengapa ia penting?

****

Tidak semua organisasi kemasyarakatan mempunyai karakter civil society, yang dapat menjadi pilar bagi tumbuhnya masyarakat yang terbuka, plural, dan dinamis. Ada yang menyuburkan, ada yang menghambat.

Larry Diamond menjelaskan istilah civil society dengan lengkap[8]. Ia mendefinisikannya sebagai kehidupan social yang terorganisir, tumbuh secara sukarela, umumnya besifat swadaya, dan tidak terkooptasi oleh pemerintah. Di samping syarat ini, untuk berkarakter civil society, sebuah kelompok harus pula memenuhi kriteria yang lain.

Pertama, kelompok itu haruslah concern pada dimensi publik dunia sosial (public sphere). Segala hal yang bersifat pribadi, tidak berada di lingkup civil society. Bukan masalah pribadi itu tidak penting. Masalah pribadi diserahkan kepada setiap aktor berdasarkan prinsip self-determination, sejauh ia tidak memiliki efek ke dunia publik. Hanya di dunia publik setiap aksi akan memberi pengaruh kepada pihak lain.

---

8 Larry Diamond: Toward Democratic Consolidation, Journal of democracy Vol 5, July 1994, hal.4-17.

Kedua, walau kelompok itu tetap berhubungan dengan negara, namun sejak awal ia tidak ingin terlibat merebut posisi resmi pemerintahan. Ia hanya aktif dalam mengontrol, mempengaruhi policy dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Dalam bangsa modern, tidak segala proses politik terjadi dan berpusat di wilayah pemerintahan. Selalu dibutuhkan hadirnya kelompok sosial yang memang memposisikan diri berada di luar pemerintahan.

Ketiga, kelompok itu punya komitmen pada pluralitas dan diversity. Seluruh organisasi yang sektarian tidak termasuk bagian civil society, seperti fundamentalisme agama, ekstrimisme etnis, dan berbagai lembaga lain yang mengklaim sebagai satu-satunya pengembang kebenaran mutlak. Kelompok yang berniat memonopoli ruang kesadaran bertentangan dengan situasi persaingan yang disyaratkan civil society.

Tentu saja kehadiran kelompok yang sektarian tidak terhindari dalam situasi masyarakat yang majemuk. Namun mereka tidak pernah menjadi kekuatan dan inisiator masyarakat modern. Realitas plural dan kemauan menerima perbedaan pandangan mengisolasi mereka, menjadikan mereka duri dalam setangkai bunga.

Keempat, kelompok yang berkarakter civil society, selalu bersifat parsial. Ia tidak berniat mewakili komunitas secara keseluruhan. Tak ada kelompok yang mampu mengemban semua kepentingan. Bahkan untuk sebuah kepentingan, katakanlah kepentingan bisnis atau profesi, tetap tidak ada yang mampu mewakili

kehendak semua anggota. Sebuah kelompok yang monopolistik dan holistik, bertentangan dengan prinsip parsialitas.

Kelima, civil society tidak hanya membebaskan diri dari kekuatan negara, namun bebas pula dari kekuatan politik. Sudah dimaklumi partai didirikan memang untuk berkompetisi merebut posisi resmi pemerintahan. Sedangkan lokus civil society memang tidak sama.

****

Dengan karakter di atas, banyak hal dapat dilakukan. Kekuatan masyarakat yang efektif membuat pertumbuhan sebuah bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah. Inisiatif dan kepemimpinan datang dari lebih banyak sumber. Kekuasaan pemerintah pun akan sangat terkontrol dan terlindungi dari the abuse of power. Kritik dan koreksi atas aktor ataupun kebijakan pemerintah secara otomatis diberikan oleh berbagai kekuatan di luarnya.

Ia merangsang pula partisipasi dan ketrampilan yang dibutuhkan warga negara yang aktif. Seperti yang dikatakan Tocquiville, partisipasi sukarela masyarakat yang independen dan plural adalah pilar dari kultur demokrasi. Independensi yang membedakan apakah sebuah kelompok atau individu berpartisipasi atau dimobilisasi.

Karena komitmen pada pluralitas, civil society dapat menjadi arena bagi pengembangan sikap moderat, toleran, rela berkompromi dalam mencari aturan main

bersama, serta menghormati pendapat yang berbeda bahkan bertentangan. Perbedaan pandangan dan kepentingan tidak berubah menjadi konflik tetapi kompetisi.

Bukankah tidak segala hal dapat dan perlu ditampung oleh partai di parlemen? Berbagai kepentingan justru efektif dimainkan di luar partai, seperti perjuangan kaum minoritas, emansipasi hak-hak wanita atau etnis. Sasaran kepentingan ini lebih pada tumbuhnya kesadaran baru. Civil society dapat menjadi saluran penyaluran kepentingan di luar partai politik.

Yang tidak kalah penting, keberagaman yang ditumbuhkan civil society membuat banyak kepentingan dapat saling-silang, sehingga polaritas dan konflik dapat terjembatani. Organisasi agama dapat dianggotai oleh berbagai etnis. Organisasi etnis dapat dianggotai oleh berbagai agama. Dapat lahir pula organisasi antar (multi) agama dan antar (multi) etnis.

****

Indonesia era Orde Baru adalah contoh tipe rejim yang tidak kondusif bagi tumbuhnya civil society. Di era itu, kondisi civil society berada dalam level yang rendah. Pertumbuhannya terhambat karena ia terkait dengan state corporatism policy, berbagai kelompok kepentingan masyarakat diorganisasikan dalam sebuah wadah tunggal. Misalnya PWI untuk wartawan, KNPI untuk pemuda, SPSI untuk buruh.

Karena pembentukan kelompok itu lebih untuk mengendalikan kekuatan strategis masyarakat, distorsi terjadi. Organisasi yang dibentuk kurang berkembang sebagai representasi kepentingan anggota, namun menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membuat kebijakannya diterima.

State corporatism policy yang sangat efektif dijalankan menghasilkan satu fungsi terjaganya stabilitas politik. Namun fungsi lain tidak dapat dihasilkan oleh state corporatism. Berbagai kontribusi yang dapat diberikan oleh civil society, seperti yang telah diuraikan di atas, tidak alami. Satu diantaranya terciptanya pemerintahan yang bersih dan kewenangan yang terbatas.

Ketika kebutuhan akan kebebasan membesar dan memperoleh momentumnya, stabilitas politik pun tidak dapat dijamin. Tidaklah heran jika Orde Baru kemudian terjungkal dan diiringi oleh aneka kerusuhan. Indonesia baru yang hendak kita bangun jangan melupakan pentingnya civil society itu.

6

Pentingnya Hak Beropini

Seandainya kebenaran dapat ditemukan, ujar John Stuart Mill (1806-1873), kebebasan menyatakan pendapat adalah sarananya. Kebebasan itu membuat berbagai ide berkompetisi, saling membuka kelemahan dan kesalahan. Berlangsungnya tantangan, debat, dan ketidaksepakatan dalam masyarakat menjadi positif. Bahkan seandainya kebenaran tidak dapat ditemukan, kebebasan menyatakan pendapat tetap penting. Ia akan menyeleksi ide yang baik dari kumpulan ide buruk.

Kemudian hari, pendapat Mill ini menjadi dasar filsafat bagi satu sistem negara modern. Berbagai kelompok dan individu, dengan kepentingan dan kesadaran yang berbeda, dibiarkan menyatakan opininya tentang banyak hal. Karena beropini butuh pendengar/ pembaca, maka hak itu dilanjutkan dengan

hak menerbitkannya melalui, antara lain, media cetak. Tanpa adanya kebebasan menerbitkan media cetak, hak beropini kehilangan sebagian salurannya.

****

Point 3, artikel 21, United Nations Universal Declaration of Human Rights (1984) berbunyi: kehendak rakyat menjadi dasar keabsahan sebuah pemerintah. Prinsip ini dapat merumuskan secara jelas dan sederhana apa arti kedaulatan rakyat itu. Jika terjadi sebaliknya, kehendak negara menjadi dasar keabsahan kegiatan rakyat maka sesungguhnya berlaku bukan kedaulatan rakyat tetapi kedaulatan negara.

Kedaulatan rakyat terekspresi ke dalam berbagai hak yang saling jalin-menjalin dalam sebuah mata rantai. Meniadakan atau menghambat sebagian hak itu, menyebabkan kedaulatan rakyat tidak terselenggara secara utuh.

Awalnya adalah untuk memilih dan menentukan siapa yang harus mengendalikan pemerintah, melalui pemilihan umum. Para politisi dan berbagai visi sosial dipertarungkan secara publik. Mereka yang memenangkan suara mayoritas dianggap memperoleh mandat dan keabsahan memerintah. Tanpa mengingkari hak-hak kelompok minoritas, suara mayoritas dijadikan representasi kehendak rakyat secara menyeluruh.[9]

9 Problem demokrasi secara komprehensif dapat dibaca dalam Diane Ravitch (cd): The Demo-cracy Reader (USA: Harper Perenial, 1992).

Problemnya, untuk membuat pilihan, rakyat itu memerlukan informasi. Dalam masyarakat, harus tersedia informasi yang cukup tentang segala hal yang diperlukan pemilu, baik menyangkut tokoh yang bertarung ataupun ide-ide yang dipercakapkan. Tanpa informasi yang memadai, pilihan dapat diberikan secara salah. Informasi yang tidak cukup hanya melahirkan prasangka, duga-duga dan ketidakpastian.

Benar, pemilu hanya dilakukan secara regular, misalnya lima tahun sekali. Tapi arus informasi yang dibutuhkan untuk pemilu yang well-informed, mengalir setiap hari, untuk terus dilengkapi, diperbaharui, dikoreksi. Pertarungan gagasan dan pengenalan atas tokoh-tokoh wakil gagasan itu, baik dari segi kecakapannya ataupun integritas pribadinya, dibutuhkan setiap saat. Hak memilih (right to vote) akhirnya membutuhkan hak untuk mendapatkan dan memberikan informasi (right to know).

Informasi hanya tersedia jika mereka yang berkepentingan dibolehkan mengeluarkan pendapat. Tidak ada pendapat dan opini, berarti tidak ada informasi. Hak beropini berarti adalah mata rantai selanjutnya dari hak informasi.

Sejak individu dan kelompok masyarakat itu beragam, wajar pula jika lahir opini yang beragam. Kesadaran sosial dan kepentingan yang berbeda akan melahirkan opini yang berbeda bahkan bertentangan. Menerima hak beropini berarti menerima pula pertentangan dan keberagaman pendapat.

Persoalannya, hak menyatakan opini tidak punya arti jika tidak ada pendengar/ pembaca, karena opini tidak disampaikan untuk diri sendiri. Akibatnya hak beropini secara otomatis memerlukan hak lain, yaitu hak untuk mempengaruhi orang lain, baik secara langsung bertatap muka, ataupun tidak langsung melalui media. Dua hak lahir sekaligus. Yaitu hak berkumpul, dimana mereka yang berkepentingan ingin mempertukarkan gagasan dan mempengaruhi audience secara langsung berjumpa di sebuah tempat yang sama. Dan hak menerbitkan opini dalam bentuk media, menjangkau mereka yang tidak dapat dijumpai secara tatap muka.

Menjadi jelas, menerbitkan media cetak menjadi hak setiap individu karena ia berhubungan secara erat dengan hak-hak lain dalam sebuah prinsip kedaulatan rakyat. Hak individu untuk memilih adalah awalnya dan hak individu menerbitkan media adalah turunannya. Hak menerbitkan media cetak tidak datang dari pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan dibuat justru untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak itu. Pemerintahan dan konstitusi disusun agar hak-hak individu ini dilindungi dari, misalnya, individu atau kelompok lain, atau dari pemerintahan sendiri, yang ingin menyeragamkan informasi.

****

Jika setiap individu dibolehkan menerbitkan opininya, tidakkah akan terjadi anarkis dan ketidaktertiban? Keindahan dari kebebasan adalah kedaulatan dan hak individu yang satu dibatasi oleh kedaulatan dan hak

individu lainnya. Pembatasan dan tertib tetap terjadi tetapi bukan dalam rangka kepentingan pihak yang memerintah, namun kepentingan warga lain.

Setiap individu dilindungi dari serangan pihak lain yang berlandaskan informasi salah. Ini berarti setiap opini tidak bebas untuk menyebarkan kebohongan. Secara lebih luas, setiap opini tetap terikat kepada hukum kriminal. Kebebasan opini berarti bebas sejauh tidak melanggar hukum kriminal.

Eksistensi pemerintah yang sah wajib pula dihormati. Pemerintahan dibutuhkan untuk melindungi individu itu dari aneka kekerasan dan paksaan pihak lain, ataupun serangan dari negara lain. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif, ia memerlukan berbagai rahasia militer. Ia juga memerlukan jaminan perlindungan, seperti tidak dijatuhkan oleh pihak lain melalui kekerasan. Kebebasan beropini, berarti bebas sejauh ia menghormati eksistensi pemerintah yang sah, tidak membongkar rahasia negara, dan tidak menganjurkan menjatuhkan sebuah pemerintahan dengan kekerasan.

Namun aktor pemerintahan dan kebijakannya tetap dapat dijadikan sasaran kritik. Menghormati eksistensi pemerintahan yang sah tidak berarti membuat aktor pemerintah dan kebijakannya kebal atas kesalahan. Oleh karena aktor dan kebijakan selalu mungkin salah, oleh karena itu pula mereka boleh bahkan harus jadi sasaran evaluasi masyarakatnya.

Prinsip-prinsip hak asasi, seperti kesamaan di depan hukum, menjadi pembatas pula. Bebas beropini berarti bebas sejauh menghormati hak asasi individu lain. Opini tidak dapat dibuat untuk menyerang seseorang semata-mata karena identitasnya seperti agama, ras dan suku. Mempunyai agama, ras, suku tertentu, dan sebagainya adalah bagian dari hak asasinya. Seseorang hanya dapat diserang dan disalahkan karena what he does bukan what he is, karena apa yang dilakukannya, bukan karena identitasnya.

****

Fakta pula bahwa mereka yang beropini selalu mungkin melanggar rambu-rambu di atas. Selalu mungkin pihak tertentu atau aktor pemerintahan diserang dengan menggunakan informasi yang salah. Untuk memudahkan administrasi dan melindungi pihak lain yang diserang secara semena-mena, diperlukan keterlibatan pemerintah untuk kebebasan beropini dan membuat media cetak.

Namun intervensi administrasi yang dibutuhkan bukanlah dalam pengertian pemerintah memberi izin atau tidak memberi izin. Jika tidak diberi izin, sebagai misal, maka individu atau kelompok itu tidak boleh menerbitkan. Izin itu sudah diberikan kepada setiap individu oleh konstitusi sebagai konsekwensi logis dari paham kedaulatan rakyat.

Yang dibutuhkan semata-mata hanya pendaftaran dan pemberitahuan. Sehingga jika ada pihak yang merasa

dirugikan oleh media itu, pihak pengelolanya mudah dihubungi. Pengadilan nanti memutuskan apakah benar rambu-rambu itu sudah dilanggar.

Apakah jaminannya bahwa hak individual menerbitkan media cetak itu tidak digunakan secara keliru? Hukum criminal dan pengadilan yang menjadi gardu penjaga. Orang tidak bebas melakukan kesalahan karena ia akan dihukum. Analog dengan itu adalah hak setiap individu dewasa memiliki sebuah pisau. Untuk menggunakan pisau itu, ia tidak perlu izin. Tapi ia tidak bebas menggunakan pisau untuk, sebagai misal, merampok atau membunuh orang karena hukum kriminal akan menghadangnya.

****

Cobalah dibuat list negara termaju di dunia sekarang ini, diukur dari kebersihan pemerintahnya, prestasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan kreativitas kulturnya. Mereka umumnya adalah negara industri barat yang sangat menghormati kebebasan beropini warganya. Ini bukan sebuah kebetulan. Kompetisi ide dan kebebasan mengemukakan atau menerbitkan informasi akan membuat setiap kesalahan lebih mudah dideteksi. Bukankah kemajuan berarti jalan lurus dengan menepiskan kesalahan sebanyak dan secepat mungkin?

Indonesia baru setelah gerakan reformasi 1998 yang memahami pentingnya hak beropini akan selamat dari kejatuhan mendadak seperti yang dialami rezim Orde

Lama dan Orde Baru. Hak beropini yang bebas itu dapat mengoreksi keburukan sistem Indonesia baru secara gradual, dengan mekanisme dan prosedur demokrasi.

7
Pentingnya Hak Berorganisasi

Carilah seratus orang paling berkuasa, seratus orang yang paling kaya dan seratus orang yang paling popular di dunia. Ujar sosiologi C. Wright Mills, jika mereka dijauhkan dari organisasi yang selama ini mendukung mereka, dipisahkan dari barisan sumber daya manusia dan uang yang selama ini menopang mereka, diasingkan dari media massa yang selama ini mengekspos mereka, perlahan-lahan mereka tidak lagi berkuasa, miskin, dan tidak dikenal.

Kekuasaan, sambung sosiolog itu, tidak berasal dari individu itu sendiri, sebagaimana sumber kekayaan dan popularitas juga tidaklah bersumber secara inheren dalam diri individu. Untuk berkuasa, untuk kaya dan untuk dikenal, mereka membutuhkan organisasi.

Organisasilah yang bekerja dan yang memberi kesempatan tersebut.

****

Sistem demokrasi modern membuat beberapa prinsip agar organisasi memberi fasilitas bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dan melindungi kepentingannya. Di sisi lain, organisasi itu tidak berkembang menjadi ancaman jika individu itu berbeda pandangan dengan pengurus organisasi ataupun pemerintah. Prinsip ini berlaku bagi semua organisasi sosial politik.

Prinsip ini dimulai dengan sebuah klaim, bahwa setiap individu memiliki hak berorganisasi. Hukum disusun untuk melindungi hak ini, bukan untuk memangkasnya. Sebuah sistem sosial dirancang dengan tujuan, tidak lain dan tidak bukan, kesejahteraan individu di dalamnya. Karena diketahui organisasi dapat memberi banyak hal, maka setiap individu diberikan hak dan kebolehan untuk berorganisasi, sejauh organisasi itu tidak digunakan untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan.

Begitu pentingnya hak berorganisasi, sehingga ia dijadikan satu prinsip hak asasi. Sistem sosial yang menghalangi individu untuk mengorganisir diri dan kelompoknya niscaya melupakan tujuan penciptaannya sendiri. Semua konstitusi demokratis, termasuk konstitusi kita, UUD 45 menjamin hak berorganisasi. Oleh karena konstitusi adalah aturan main tertinggi, maka sebuah pemerintahan dan aneka kelompok

dalam masyarakat terikat untuk menghormati hak berorganisasi.

Alur selanjutnya, karena berorganisasi berupa hak, bukan kewajiban, ia berifat sukarela. Jika merasa perlu, indiividu itu dapat menggunakannya, baik menggabungkan diri ke dalam organisasi yang ada ataupun membentuk organisasi baru. Jika tidak merasa perlu, ia dapat keluar dari sebuah organisasi atau tidak berorganisasi sama sekali.

Segala hal yang dapat dilakukan individu seorang diri, lebih baik ketimbang dilakukan bersama orang lain, akan dilakukannya seorang diri. Berarti organisasi hanya dipilih jika ia meyakini, dengan berorganisasi itu lebih baik baginya, lebih dapat melindungi kepentingannya, ketimbang ia melakukannya seorang diri. Maka harus tidak ada paksaan bagi setiap individu untuk menjadi anggota suatu perkumpulan. Terlebih lagi jika ia meyakini perkumpulan itu tidak dapat memperjuangkan kepentingannya, atau malah bertentangan dengan keyakinannya.

****

Oleh karena kepentingannya dan kesadaran setiap individu berbeda, sebuah sistem harus selalu siap dengan keberagaman organisasi di berbagai bidang. Hal yang wajar jika di setiap dimensi kepentingan ada lebih dari satu organisasi yang tersedia bagi masyarakat. Di politik, tersedia lebih dari satu partai. Di bidang profesi tertentu, juga tersedia lebih dari satu wadah. Semakin banyak pilihan, semakin baik.

Memaksakan hanya satu organisasi bagi aspirasi politik dan profesi berarti mengingkari realitas keberagaman. Ia dapat disalahkan bukan saja karena telah melakukan pemaksaan, tetapi karena melawan kenyataan pluralitas.

Di samping itu, tersedia lebih dari satu organisasi justru positif karena melahirkan kompetisi. Hanya kompetisi yang dapat memaksa setiap organisasi memperbaiki diri dan berlomba memberi jasa yang terbaik bagi anggotanya. Jika tidak mampu berkompetisi, organisasi itu akan ditinggalkan. Anggota akan pergi ke organisasi saingan atau membuat organisasi baru. Kompetisi membuat organisasi berorientasi kepada kepentingan anggota.

Tanpa kompetisi, terlebih lagi monopoli sebagai wadah tunggal, organisasi tidak dituntut memperhatikan kepentingan anggota. Baik atau buruk organisasi, para anggota tetap tinggal di sana karena tidak ada pilihan lain. Akibatnya bukan pengurus organisasi yang melayani anggota. Sebaliknya, anggota yang akhirnya melayani pengurus karena terpaksa.

Agar organisasi itu murni berjuang untuk kepentingan anggota, ia harus independen dari kekuatan lain, apakah itu kekuatan pemerintahan atau kelompok bisnis. Independensi membuat organisasi berkalkulasi sejernih mungkin. Dalam kebebasan, jika sebuah komitmen, kontrak dan kerjasama dibuat, niscaya itu dipercaya untuk kepentingan organisasi. Keuntungan organisasi tidak lain adalah keuntungan anggota.

Apa jadinya jika organisasi itu bergantung pada kekuatan lain. Hasilnya, ia lebih memperhatikan kepentingan kekuatan lain itu. Terlebih lagi jika kekuatan supra itu jauh lebih menentukan ketimbang anggota dalam pemilihan kepengurusan organisasi. Organisasi tidak menjadi kendaraan anggota untuk menyampaikan kepentingannya ke pihak lain, tetapi jadi alat kekuatan lain untuk mempengaruhi dan mengontrol anggota.

Hak berorganisasi dengan prinsip sukarela, plural, kompetisi dan independensi adalah syarat yang dibutuhkan sebuah sistem sosial. Hanya prinsip ini yang dapat membuat mekanisme otomatis dan spontan agar individu terlindung dari kekuasaan berlebih dan monopolistik organisasi.

****

Memang akan beda situasinya jika organisasi dibuat bukan untuk kepentingan individu, tetapi justru untuk mengontrolnya. Situasi menjadi berbalik. Jika yang ingin mengontrol itu pemerintah, maka semakin sebuah organisasi tergantung kepada pemerintah, semakin baik. Mudah bagi pemerintah untuk mengendalikannya.

Ekstrem lagi, semakin organisasi itu bersifat tunggal, tidak mempunyai alternatif, tidak harus berkompetisi, semakin ia berguna. Para anggota tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadi anggota organisasi itu. Para pengurus yang bergantung ke restu pemerintah akan lebih mudah mengendalikan anggota.

Dari kepentingan penguasa otoriter, semakin tidak ada hak individu untuk berorganisasi menjadi semakin baik pula. Individu itu hanya mengikuti organisasi yang sudah dibuat pemerintah dengan kepentingan yang sudah dipancang. Atau individu itu tidak berorganisasi sama sekali. Jika memiliki aspirasi yang berbeda, pengaruh individu itu akan terbatas karena tidak ada organisasi yang akan menggaungkannya.

Lalu bagaimana jika ada aktor atau kebijakan pemerintah yang salah? Pemerintah bersalah namun ia sangat berkuasa? Siapakah yang mampu melakukan kontrol dan mengorganisir tindakan koreksi? Jika hak berorganisasi dan tradisi berbeda pendapat dengan pemerintah tidak dibiasakan, pertanyaan di atas niscaya susah dijawab.

Siapapun yang memerintah Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 mesti tetap berlandaskan paham bahwa mereka bukan dewa atau malaikat. Berbagai kesalahan baik karena kelemahan personal ataupun kelemahan pilihan kebijakan akan terminimalisasi jika ada kebebasan berorganisasi, termasuk kebebasan untuk beroposisi dan mengontrol kekuasaan.

BAB 2

MEMILIH DEMOKRASI

1

Berakhirnya Format Politik Orde Baru

"Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul."

Pernyataan ini bukanlah dari John Locke, filsuf Barat itu tetapi dari Mohammad Hatta, pemikir pribumi, salah seorang proklamator kemerdekaan RI. Ia menuliskan pandangan tersebut di sebuah harian Daulat Rakyat, 20 September 1931, lebih dari enam puluh tahun lalu. Benih kesadaran itu sudah dicoba ditanam di bumi pertiwi sejak lama rupanya.

Saat itu, umumnya para aktivis yang menjatuhkan Orde Baru dan menggerakkan reformasi 1998, belum

lahir. Kerja penganjur demokrasi seharusnya lebih ringan karena hanya mengulang apa yang sudah diserukan Hatta, dengan menggunakan kosa kata politik yang lebih seru. Spirit seruan Hatta itu muncul dalam term yang beda kini, seperti self-determination, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, partsipasi politik.

Di negeri ini, tuntutan demokratisasi memang merupakan sebuah upaya yang sudah berakar panjang, sejak era pergerakan para founding fathers. Tak hanya Hatta, Tjipto Mangunkusumo juga giat menanamkan ide itu. Dalam perdebatannya dengan Sutatmo Suriokusumo, ia acap menunjukkan unsur tradisi Jawa yang dapat menghalangi gerakan kebangsaan yang lebih demokratis.

Setelah berjarak jauh dengan hiruk pikuk debat gagasan di zaman pergerakan, bagaimana rupa kedaulatan rakyat itu di era Orde Baru, Orde yang baru saja diruntuhkan.

****

Menjawab pertanyaan itu berarti membicarakan format politik Orde Baru, yang secara popular disebut Demokrasi Pancasila. Sulit menemukan dokumen tertulis yang dapat menjelaskan secara utuh dan operasional mengenai Demokrasi Pancasila. Mulya Lubis1 mencoba menelusuri konsep itu dari berbagai pidato resmi kenegaraan Presiden Soeharto.

Dari rangkuman beberapa pidato, ada beberapa kata kunci yang dapat digabung-gabung. Misalnya, penekanan pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat, konsensus atau kesatuan nasional. dikatakan bahwa demokrasi ini dibuat tidak sekedar untuk berdemokrasi (democracy in the sake of democracy) , tetapi diarahkan untuk kepentingan bersama. Dinyatakan demokrasi Pancasila tidak menerima dominasi mayoritas, tirani minoritas,juga pemerintahan otoritarian.

Cara termudah untuk memahami Demokrasi Pancasila yang menjadi self-claimed Orde Baru, mungkin harus ditelusuri dari praktek politiknya. Agar terukur dan spesifik, konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat itu dibatasi pada persoalan sistem perwakilan, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers. Dari tiga variabel itu dapat dicek pada berbagai kebijakan resmi yang ada di era Orde Baru.

Pertama, adalah soal sistem perwakilan. Dalam sistem perwakilan di DPR dan MPR Orde Baru, tidak semua anggota dipilih melalui pemilihan umum. Seratus dari anggota DPR (20%), yang kemudian berkurang menjadi tujuh puluh lima, diangkat oleh presiden yang berasal dari militer, berdasarkan UU No.1/ 1985, dan UU No.2/ 1985. Semua anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR. Anggota MPR lainnya juga diangkat. Total yang dipilih dari anggota MPR hanya sebesar 40%.

Ismail Suny, ahli konstitusi, menamakan sistem representasi ini sebagai demokrasi 40% karena hanya 40% dari anggota yang benar-benar dipilih melalui

pemilihan umum. Menurut Suny, sistem ini justru lebih buruk dari parlemen di jaman penjajahan kolonial Belanda (Volksraad). Di era kolonial jumlah yang dipilih justru lebih banyak sebesar 70%.

Hal lain yang menarik dari sistem representasi ini adalah keterwakilan militer secara otomatis. Total jumlah militer dalam rationya terhadap seluruh populasi adalah sekitar 0,5%. Namun di DPR, presentase militer adalah sebanyak 20%, bahkan di keseluruhan MPR jumlah presentase itu sebanyak kurang lebih 33%.

Kedua adalah problem kebebasan berserikat. Beberapa prinsip diterapkan untuk partai politik. Partai politik hanya diizinkan memiliki kantor cabang di kota. Melalui UU No.3/ 1975 ditetapkan kebijakan massa mengambang, yang memisahkan massa rakyat di pedesaan dari politik. Rakyat umumnya dianggap memiliki kesadaran politik yang rendah, sehingga sulit untuk berpartisipasi secara efektif dalam partai politik. Untuk alasan ini, rakyat hanya boleh didekati menjelang kampanye pemilihan umum.

Jumlah partai politik juga dibatasi. Setelah dua tahun pemilihan umumnya yang pertama Orde Baru, hanya dua partai politik (PPP, PDI dan Golongan Karya) yang dibolehkan ikut pemilihan umum. Warga sipil yang tidak masuk ke dalam partai itu, kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan susunan pemerintahan melalui pemilu ataupun duduk di parlemen.

Golkar yang selalu menang pemilu dengan mayoritas tidak kalah menariknya. Ketimbang tampil sebagai

partai yang berkuasa (the ruling party) ia lebih terkesan sebagai partai dari pihak yang berkuasa (the ruler's party). Bukan pimpinan Golkar yang menentukan susunan pemerintahan, sebagaimana layaknya partai pemenang di negara demokrasi. Sebaliknya penguasa di pemerintahanlah yang umumnya menentukan susunan kepengurusan Golkar.

Hal lain yang menarik, birokrasi pemerintahan yang terdiri dari pegawai negeri tidak dibuat netral. Melalui Korpri, pegawai negeri ini menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Dalam demokrasi kita tahu setiap partai punya kemungkinan untuk menang. Apa jadinya jika partai lain (di luar Golkar) yang menang. Kita bayangkan betapa sulit partai itu mengendalikan pemerintahan kelak, karena seluruh pegawai negeri yang dibawahinya adalah korps partai lain, Golkar. Apakah partai selain Golkar itu jika menang harus membentuk korps pegawai negeri baru?

Fenomena lain dari kebebasan berserikat adalah organisasi massa. UU No.8/1985 menjadi politik regulasi yang secara efektif dapat mengendalikan berbagai kelompok strategis masyarakat. Dalam UU itu, setiap organisasi massa punya kewajiban untuk mendaftar. Sebelum terdaftar dan diakui pemerintah, organisasi itu menjadi gelap dan terlarang. Politik pendaftaran dengan sendirinya sangat membantu pemerintah untuk menolak organisasi yang tidak dikehendaki.

Ada pula kewajiban wadah tunggal bagi organisasi sejenis, dan profesi. Wartawan hanya boleh memiliki

satu organisasi korporatis, PWI untuk wartawan, SPSI untuk buruh,. Lalu HKTI untuk tani, HNSI untuk nelayan, KNPI untuk pemuda, MUI untuk ulama. Berbagai organisasi ini memiliki monopoli yang tidak punya saingan organisasi lain di bidangnya.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membina bahkan membubarkan organisasi. Situasi ini membawa kemungkinan yang khas. Ketimbang organisasi menjadi suara anggota untuk disampaikan ke pemerintah, ia lebih menjadi saluran pemerintah untuk mengendalikan anggota.

Ketiga, soal kebebasan pers. Tindak tanduk pers sudah dibingkai dalam kebijakan yang dinamakan pers Pancasila. Tidak seperti di negara liberal, disini dikatakan, pers berfungsi sebagai instrument pembangunan yang memelihara ketertiban, harmoni dan keamanan. Pers yang bebas, yang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah, watchdog, tidak sesuai serasi lagi dalam bingkai ini.

UU Nomor 11 Tahun 1966 ayat 8, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak mempublikasikan pers sesuai dengan esensi Demokrasi Pancasila. Untuk hal ini tidak diperlukan SIT (Surat Ijin Terbit). Namun ayat 20 membuat pernyataan tersebut batal. Ayat 20 menyatakan bahwa selama masa transisi, kewajiban memiliki SIT tetap berlaku, sampai pemerintah dan DPR membuat aturan baru.

Hak untuk mempublikasikan pers hanya dimiliki oleh warga Negara yang memiliki SIT. Yang memberikan

SIT adalah pemerintah. Dalam perspektif hak asasi manusia kenyataan ini dapat rancu. Ia memberi kesan seolah-olah pemerintah, bukan alam, bukan Tuham, yang menjadi sumber hak asasi. Keharusan memiliki SIT kemudian dihapus oleh UU No. 21/1982 yang baru ini memperkenalkan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).

Dalam praktek, dibawah SIT atau SIUPP, sudah banyak terjadi penyetopan terbit mass media, yang dilakukan pihak eksekutif, tanpa melalui sidang pengadilan. Kesalahan pihak media dengan demikian tidak dibuktikan di Pengadilan. Pihak media tidak diberikan hak untuk membela diri.

Seperti ini gambaran dan riwayat kedaulatan rakyat dalam format politik Orde Baru. Gerakan reformasi 1998 sudah meluluhlantakkan format politik itu. Persoalannya kemudian, bagaimana menjaga momentum gerakan reformasi itu. Dari pengalaman negara lain, selalu ada kemungkinan transisi ke demokrasi gagal, dan format politik Orde Baru bangkit kembali melalui penguasa yang berbeda.

2

Memilih Demokrasi, Bukan "Jalan Asia"

Lee Kuan Yew saat itu masih menarik perhatian. Di depan The Philippines Chamber of Commerce and Industry, November 1992, ia menghujat. "Bertentangan dengan apa yang diyakini para komentator politik AS," ucapnya. "Saya sama sekali tidak percaya demokrasi diperlukan untuk mendorong pembangunan. Apa yang diperlukan oleh sebuah negara adalah sikap disiplin daripada demokrasi.

"Kegairahan kepada demokrasi justru membawa sikap tidak disiplin dan ketidaktertiban yang buruk bagi pembangunan. Tes tertinggi sistem politik adalah kemampuannya membawa masyarakat meningkatkan standar hidup." Klimaks dari pandangannya, Lee Kuan Yew menukik, bahwa sistem demokrasi gaya AS-lah yang menyebabkan Filipina jatuh miskin seperti

sekarang.[10] Reaksi audience beragam. Yang tipikal mungkin respon dari mantan anggota cabinet era Corry Aquino. Jika anda tanya secara resmi, tentu saya tidak setuju dan marah, jawabnya. Namun, jika anda berjanji tidak menuliskan nama, saya katakan yang sebenarnya. Kami semua mengakui bahwa Lew Kuan Yew benar.

Tak kalah keras, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, punya opini yang mirip. Pada pertemuan politik di Malaysia tahun 1993, ia juga menghujat. "Demokrasi," seru Mahathir, "sudah menjadi sejenis agama di Barat, dan di sana telah membawa masyarakat ke kultur homoseksual, intoleransi rasial, pembusukan moral, turunnya pertumbuhan ekonomi, dan fenomena orang tua tunggal (single parents)."

Kemudian hari, Lee Kuan Yew dan Mahathir Muhammad menjadi bapak intelektual bagi "Pembangunan Jalan Asia". Yaitu model pembangunan yang berorientasi pada ekonomi pasar tetapi dikombinasikan dengan sistem politik yang ketat, dengan hak-hak warga yang terbatas. Demokrasi bukan saja tidak ditiru, namun diberi konotasi yang negatif sebagai bukan kultur Asia.

Adakah negara kita, Indonesia baru setelah gerakan reformasi 1998, juga tertarik mengambil "Pembangunan Jalan Asia"? Orientasi pada ekonomi pasar sudah dipilih melalui liberalisme ekonomi, terutama setelah

10 Seperti direkam oleh National Review, 29 November 1993.

berlangsungnya konferensi APEC di sini. Apa yang menjadi pasangannya: demokrasi atau politik ketat?

****

Filipina telah dijadikan contoh buruk bagi demokrasi. Dari tahun 1965 sampai 1990, ekonomi 23 negara di Asia Timur tumbuh lebih cepat daripada wilayah lain di dunia. Asia Timur melesat dipimpin oleh Jepang dan empat negara : Hongkong, Singapura, Taiwan dan Korea. Mengikuti di belakang, calon negara industri baru : Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Selama periode itu, wilayah ini tumbuh tiga kali lebih cepat dari Amerika Latin, lima kali lebih gencar dari sub-saharan Afrika, bahkan lebih cepat dari negara kaya minyak di Timur Tengah dan negara industri maju. World Bank mencatat jika pertumbuhan ekonomi terjadi dan terdistribusi secara acak, kemungkinannya adalah satu banding 10000 bahwa sukses bisa terkonsentrasi secara regional seperti kasus di Asia Timur.

Filipina ada di titik rawan. Hanya satu generasi lalu, Filipina menjadi kisah negara sukses di Asia dan hanya kalah dengan Jepang. Bahkan di dekade lima dan enam puluhan, negara ini mengirimkan para ahli pembangunannya ke Korea Selatan. Sekarang ini, situasi berbalik sama sekali.

Di Hongkong sekarang, simbol dari Filipina bukan lagi Cory Aquino dengan People Power dan revolusi rakyat, tetapi pembantu rumah tangga. Ada begitu banyak warga Filipina di Hongkong, yang didorong

oleh keadaan, pergi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Situasi buruk Filipina kemudian dihubungkan dengan demokrasi. Kesalahan Filipina yang ketinggalan kereta kesejahteraan, dianggap karena terlalu cepat menerapkan demokrasi.

****

Benarkah demokrasi di negara berkembang cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan memiskinkannya? Sikap kontra atas demokrasi, sebagaimana kontra atas sistem politik lain, selalu dihormati sebagai keyakinan pribadi. Namun jika berpretensi ilmiah dan menginginkan pernyataan obyektif tentang realitas, menyatakan demokrasi berakibat buruk atas pembangunan perlu pembuktian lebih jauh.

Sebuah kasus, seperti kasus Filipina, selalu tidak memadai untuk sebuah generalisasi. Seandainya benar demokrasi di sana menjadi penyebab kemunduran ekonomi, tetap tidak dapat diklaim bahwa hal itu akan berlaku di manapun dan kapanpun. Jika ditemukan kasus sebaliknya, dimana demokrasi mendukung pertumbuhan ekonomi, generalisasi yang sama tidak dapat diklaim. Dibutuhkan contoh yang lebih banyak dengan rentang waktu yang lebih lama.

Pada titik ini kita perlu mendengar Adam Przeworski dan Fernando Limongi. Mereka mengumpulkan studi

beberapa peneliti tentang hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan di puluhan negara dalam rentang waktu yang panjang. Para peneliti sendiri ternyata tidak sampai kepada kesimpulan yang sama. Bukti statistik menunjukkan tiga kategori korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.[11]

Pertama, temuan yang mengatakan negara yang otoritarian lebih baik buat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, demokrasi bersifat inferior. Peneliti yang menemukan ini antara lain Prezeworski (1966), dengan sampel 57 negara dalam rentang waktu 1949-1963.

Adelman dan Morris (1967) sampai pada kesimpulan yang sama dengan meneliti 74 negara terbelakang termasuk blok komunis pada periode 1950-1964. Huntington dan Dominguez (1975) juga berpendapat serupa setelah ia meneliti 35 negara miskin di tahun 50-an.

Jumlah peneliti dapat diperpanjang lagi dengan memasukkan nama Marsh (1978) dengan jumlah sampel 98 negara di tahun 1955-1970, dan Weede (1983) yang meneliti 124 negara dalam rentang waktu 1960-1974.

Kedua, temuan sebaliknya yang menyatakan justru demokrasi, dibanding sistem politik lain, yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti yang menemukannya, antara lain Dick (1974) yang mengamati 59 negara terbelakang di tahun 1959-1968. Juga peneliti

---

11 Dikutip dari Jurnal of Economic Perspective, Volume 7 summer 1993.

Kormendi dan Meguire (1985) yang meneliti 47 negara dalam rentang 1950-1977 berkesimpulan sama. Pougerami (1988) yang meneliti 92 negara di periode 1965-1984, mendukung klaim itu. Temuan yang mirip diperoleh dari Barro (1989) yang mengamati 72 negara di tahun 1960-1985, dan Scully (1988-1992) dengan sampel 115 negara di periode 1960-1980.

Ketiga, temuan yang netral yang mengatakan baik demokrasi atau sistem politik lain tidak berbeda secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti itu antara lain Kohli (1986) yang mengamati 10 negara terbelakang di tahun 1960-1982. Marsh (1988) dengan jumlah sampel 47 negara di periode 1965-1984 menyatakan hal sama. Temuan serupa dinyatakan pula oleh peneliti Remmer (1990) yang mengamati 11 negara Amerika Latin di periode 1982-1988 dan Helliwell (1992) yang meneliti 90 negara di rentang waktu 1960-1985.

Bukti statistik di atas lebih obyektif dan valid karena melibatkan banyak peneliti profesional. Pernyataan fair yang harus dibuat. Berdasarkan lebih dari sepuluh penelitian di atas, hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat inkonklusif. Demokrasi mungkin menghambat, atau malah mendorong atau tidak terpengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesan buruk atas demokrasi akibat kasus pemiskinan Filipina dengan demikian kehilangan validitasnya.

Demokrasi tidak dapat pula disalahkan karena di negara demokrasi Barat tumbuh kerusakan moral,

homoseksual ataupun fenomena orangtua tunggal. Di negara Barat yang sama dapat kita temukan, hal sebaliknya, seperti bangkitnya kembali agama. Di AS, sebagai misal, para aktivis agama mulai berkampanye masuk ke Partai Republik. Nilai-nilai keluarga, back to family, kembali diagungkan dan menjadi isu strategis para politisi. Di negara demokrasi yang sama kita temukan tingginya penelitian ilmiah dan kreativitas seni.

Harus dipisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan way of life masyarakat. Oleh karena demokrasi adalah sistem yang memberi kebebasan dan partisipasi masyarakat, apa yang tampil di publik sangat tergantung dari kecenderungan populasi. Demokrasi yang diterapkan dalam masyarakat religius dengan sendirinya akan didominasi oleh cita-cita religius karena populasi di sana menghendaki demikian.

****

Akhir kata, demokrasi memang tidak diciptakan karena efeknya kepada pertumbuhan ekonomi ataupun way of life populasi, walau bukti menunjukkan demokrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ataupun menyebarkan keluhuran way of life populasi.

Demokrasi dipilih karena ini sistem terbaik dari yang buruk, yang lebih menjamin bahwa para warga negara dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Landasan moralnya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan personal ataupun sosial.

Di samping itu, demokrasi adalah cara yang efektif untuk mengontrol operasi kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang. Hal yang lazim jika pembela demokrasi umumnya lapisan masyarakat yang terdidik. Hal yang jamak pula jika penentangnya adalah mereka yang sedang mengendalikan pemerintahan.

Gerakan reformasi tahun 1998 adalah sebuah mosi tidak percaya kepada rezim otoriter Orde Baru, Jalan Asia yang digembor-gemborkan Lee Kuan Yew dan Mahathir telah pula kehilangan pesonanya sejak meluasnya krisis Asia tahun 1997 dan 1998. Sistem demokrasi seperti yang berkembang di negara Barat kini menjadi satu-satunya pilihan Indonesia baru.

3
Menetralkan Pegawai Negeri

John W. Kingdon [12] berargumen dengan jernih. Kualitas sebuah sistem pemerintahan ujarnya, ditentukan pula oleh kondisi korps pegawai negeri pemerintahan itu. Mengutip Hill Staffer, ia pun berucap, dalam pemerintahan para politisi datang dan pergi, namun birokrasi pegawai negeri tetap di sana.

Politisi masuk ke pemerintahan karena ia dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pada pemilu berikutnya, politisi itu mungkin tidak terpilih lagi dan ke luar dari pemerintahan. Namun pegawai negeri, sebagai sebuah korps, akan terus bekerja di sana, tidak peduli politisi mana yang akan memenangkan pemilu. Keterlibatan pegawai negeri itu dalam pemerintahan jauh lebih

12 John W. Kingdon, Agendtls, Alternatives and Public Policies (USA : Harper Collins, 1984).

panjang dari karir umumnya politisi. Tempat pegawai negeri memang di pemerintahan namun karir politisi di pemerintahan tergantung dari hasil pemilu.

Korps pegawai negeri posisinya sangat khusus. Justru karena ia khusus dan tunggal, korps pegawai negeri harus menundukkan diri hanya kepada negara, bukan kepada partai politik. Sebuah partai yang ingin mengidentikkan korps pegawai negeri dengan partainya, atau mewajibkan korps pegawai negeri hanya memilih partainya, telah melakukan kesalahan mendasar. Partai itu telah mengidentikan dirinya dengan negara.

****

Prinsip demokrasi memang menghendaki dinetralkannya korps pegawai negeri dari politik partai. Korps pegawai negeri yang memihak salah satu kekuatan politik (partai) yang bertarung dalam pemilu, akan merusak sistem yang kompetitif dan adil.

Birokrasi pemerintahan menjadi tidak siap dengan pergantian pimpinan dari partai yang berbeda. Padahal sistem demokrasi membuka kemungkinan tampilnya setiap partai untuk memimpin pemerintahan.

Pada awalnya adalah rakyat, demikian ayat pertama filsafat demokrasi. Mereka membentuk sebuah komunitas untuk mengembangkan kehidupannya. Pemerintah kemudian didirikan. Banyak hal yang tidak dapat dikerjakan rakyat kecuali dengan menggunakan otoritas pemerintahan.

Persoalan menjadi rumit karena rakyat sebenarnya tidak ada. Term itu hanya kategori abstrak dan mudah untuk mengidentifikasi sekumpulan orang. Yang ada adalah berbagai individu yang berbeda satu sama lain. Rakyat tidak lebih dan tidak kurang adalah kumpulan individu yang tidak dapat diseragamkan dalam sebuah label. Masing-masing individu memiliki kepentingan, kesadaran, dan cita-cita sosial yang tidak sama.

Ketika sebuah pemerintahan dibentuk, kepentingan, kesadaran dan cita-cita sosial siapa yang harus dijadikan program? Semakin modern dan kompleks sebuah msyarakat, semakin banyak nilai dan kebijakan yang tersedia. Sebagian ada yang bersifat trade off, hanya mungkin memerintah kadar satu nilai dengan mengurangi kadar nilai lainnya.

Misalnya, pilihan antara efisiensi dan equity. Sebuah sistem yang dirancang untuk semakin efisien dapat berakibat semakin tingginya jurang pemerataan. Sedangkan sebuah mekanisme yang berakibat pada pemerataan hasil (equality of outcomes) dapat berakibat munculnya sistem yang tidak efisien.

Ada pula pilihan antara kebebasan dan kestabilan. Meninggikan kadar kestabilan dapat menyebabkan berkurangnya kebebasan masyarakat. Membebaskan masyarakat dapat pula menyebabkan tidak stabilnya situasi. Dalam tingkat yang lebih teknis, ada pilihan seperti menurunkan pajak namun mengurangi subsidi buat kaum miskin, atau menambah subsidi buat si miskin namun dengan menaikkan pajak kelas

menengah. Pilihan lain, antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan. Penurunan inflasi atau penurunan jumlah pengangguran.

Pilihan menjadi sulit karena punya pengaruh kepada segmen komunitas. Kebijakan apapun berakibat diuntungkannya sebagian kelompok dan dirugikannya kelompok lain. Lalu siapa yang harus diuntungkan dan siapa yang membayar bebannya?

Sistem demokrasi memberikan beberapa prinsip dan prosedur, agar pilihan itu dapat dibenarkan secara moral. Individu dewasa dalam komunitas berdaulat menentukan nilai dan kebijakan apa yang seharusnya diadopsi, melalui pemilu. Mekanisme pemilu dibuat secara reguler karena keinginan publik selalu berubah. Lalu ada kompetisi yang bebas dan adil antar para politisi (partai politik) untuk menjajakan visi yang mereka yakini. Politisi (partai politik) yang memperoleh suara mayoritas dianggap memperoleh pembenaran moral untuk menjalankan pilihan nilai dan kebijakannya untuk seluruh komunitas.

****

Persoalannya, politisi (partai politik) manapun yang terpilih selalu membutuhkan mesin birokrasi untuk menjalankan program. Mesin birokrasi ini adalah pegawai negeri yang berperan sebagai operator visi sang politisi. Tanpa dukungan korps pegawai negeri ini, visi politik yang dijajakan semasa kampanye tidak dapat direalisasi. Akibatnya mandat dari rakyat

yang berdaulat tidak dapat dipenuhi. Korps pegawai negeri dapat disalahkan bukan semata karena ia tidak mendukung politisi yang memenangkan pemilu, namun terutama karena ia turut membuat kedaulatan rakyat tidak mengejawantah secara sempurna.

Karena itu, korps pegawai negeri harus siap mendukung dan dipimpin oleh politisi yang datang dari latar belakang partai manapun, dengan visi politik apapun. Di AS, sebagai misal, suatu ketika mereka dipimpin oleh Partai Demokrat di bawah Presiden Carter. Empat tahun kemudian, mereka dipimpin oleh Partai Republik di bawah Reagen. Setelah dua belas tahun dipimpin oleh Republikens, mereka dipimpin lagi oleh Partai Demokrat di bawah Clinton.

Agar siap mendukung berbagai visi dan partai politik, korps pegawai negeri harus dinetralkan secara politik, tidak berafiliasi kepada visi dan partai politik apapun. Setiap partai memiliki visi sosial yang berbeda dan kadang bertentangan. Bahkan dua orang presiden dari partai yang sama dapat memberi tekanan kepada nilai dan kebijakan yang lain. Bagaimana dapat berdedikasi kepada berbagai pilihan politik politisi, jika korps pegawai negeri itu memiliki pilihan politik yang berbeda?

Apa jadinya jika korps pegawai negeri itu tidak netral secara politik? Misalkan, korps itu diarahkan mendukung Partai Demokrat, tetapi Partai Republik yang memenangkan pemilu? Sama halnya korps pegawai negeri yang diminta berpihak kepada Golkar, akan

rikuh jika yang ternyata memenangkan pemilu adalah PPP, PKB, PAN atau PDI Perjuangan. Sistem akan menghadapi pilihan sulit.

Pilihan pertama, Golkar harus dimenangkan, karena korps pegawai negeri sudah terlanjur memihak Golkar. Ini satu-satunya cara agar politisi dan pegawai negeri dalam pemerintahan berada dalam aspirasi politik dan partai yang sama. Jika ini terjadi, pemilu kehilangan esensinya karena pemenang sudah diniscayakan oleh sistem.

Pilihan kedua, partai lain boleh menang namun menghadapi resiko sistem pemerintahan yang tidak efisien. Pimpinan politisi datang dari partai lain, namun aparat birokrasinya adalah Golkar. Selalu mungkin terjadi konflik kepentingan antara politisi dan korps pegawai negeri yang membawahinya. Jika Korpri tidak dinetralkan, bukankah dua pilihan di atas sama-sama buruk?

****

Sebuah pemerintahan modern meminta banyak sebagai prasyarat. Dua diantaranya, adanya sistem kepartaian yang kompetitif, dan adanya korps pegawai negeri yang netral. Partai politik yang kompetitif menghasilkan kebijakan dan pemimpin yang teruji, karena mereka sudah dipertarungkan dan dipilih oleh publik. Sedangkan korps pegawai negeri yang netral dapat menjadi mesin birokrasi yang efisien dan profesional bagi politisi manapun yang terpilih.

Dalam pemilu pertama demokratis setelah tahun 1955, pemilu 1998 era reformasi, korps pegawai negeri sudah dinetralkan. Netralitas ini mesti terus dijaga dan diawasi untuk seterusnya. Efektivitas dan kemampuan memerintah (governability) pemerintah baru juga ditentukan oleh netralitas politik korps pegawai negeri atau birokrasi.

4
Militer Yang Tak Berpolitik

Grafik itu menyita satu halaman penuh. Di bagian atas, diberi judul: Tahap-tahap Keterlibatan Militer dalam Politik. Lalu ada periode waktu mulai dari Indonesia merdeka tahun 1945, sampai bangkitnya Orde Baru di tahun 1967. Di sisi sumbu grafik yang tegak lurus, dibuatkan kategori, mulai dari supremasi sipil diakui, supremasi militer dipertanyakan, supremasi sipil ditolak, sampai ke kekuasaan militer.

Di tahun 1945, grafik menunjukkan supremasi sipil dalam politik Indonesia di akui. Sedangkan di awal Orde Baru di tahun 1967, kurva bergerak ke kutub sebaliknya, berlangsungnya kekuasaan militer.

Grafik dalam Ulf[13] Sundhausen ini masih menarik dibaca. Terutama untuk memberi background

kecenderungan peran politik militer di Indonesia era Orde Baru. Setelah gerakan reformasi 1998, adakah bandul politik militer kembali ke asal? Kembali ke spirit ketika negara ini untuk pertama kali didirikan di tahun 1945. Saat itu, seperti yang digambarkan Sundhausen, supremasi sipil diakui. Mengapa pula para pendiri negara ini memilih mengakui supremasi sipil di tahun 1945 itu?

Yang kita tahu, supremasi sipil memang menjadi bagian sentral dalam demokrasi Barat. Kepemimpinan politik dikendalikan oleh sipil, dan militer menundukkan diri ke dalam kepemimpinan sipil. Secara resmi, presiden yang sipil itu menjadi commander in chief dari kekuatan militer. Presiden bukan saja punya hak prerogrative untuk mengarahkan militer namun juga untuk melibatkan mereka ke dalam perang.

Demokrasi Barat membuat pembagian kerja. Masalah politik diurus oleh sipil, sedangkan militer menangani persoalan teknis militer. Berbagai negara yang kini menempati ranking teratas dalam human development, seperti yang diukur oleh UNDP yang kini sangat maju secara ekonomi (dan bebas secara politik) menggunakan model itu: supremasi sipil.

Secara global, peran militer sendiri sedang berubah. Richard Rosecrance dalam bukunya The Rise of Trading States bercerita banyak. Ada dua cara bagi sebuah negeri untuk menaikkan statusnya dalam hubungan

---

13 Ulf Sundhausen: Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 463.

internasional. Jika tidak melalui jalan perdagangan (ekonomi) maka melalui jalan politik militer. Jalan perdagangan menggalakkan pembangunan ekonomi secara lebih damai dan tertib. Sedangkan jalan politik militer menggunakan strategi militer untuk menjaga dan meluaskan teritori kekuasaan.

Menurut Richard, sejak abad ke-16 sampai tiga dekade setelah Perang Dunia II, cara politik militer sangat dominan. Dapat diberi contoh beberapa pemimpin Eropa yang menonjol melalui jalan itu: Philip II dari Spanyol, Louis XIV dan Napoleon dari Perancis, Bismarck dari Prusia, Hitler dari Jerman, Mussolini dari Italia. Para pemimpin ini acapkali menyulut perang dalam rangka ekspansi kekuasaan.

Kini hubungan antar negara lebih ditentukan oleh hukum ekonomi. Negara yang sukses sekarang ini adalah negara yang kurang tampil sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai kekuatan perdagangan. Rosencrance menyebut negara sukses yang baru itu (termasuk Jepang, Jerman, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura) sebagai negara dagang. Di seluruh negara dagang ini, nilai ekspor terhadap pendapatan nasional membesar, sedangkan porsi belanja pertahanan militer relatif kecil. Jalan ekonomi perdagangan menggantikan jalan politik militer.

Dunia yang baru agaknya semakin mengecilkan peran militer. Menarik untuk diamati, bagaimana TNI secara arif merumuskan kembali perannya di dunia yang baru itu.

****

Sejak Soeharto lengser, ada beberapa reformasi internal yang dilakukan ABRI. Misalnya memisahkan polisi dari TNI, serta mempensiunkan TNI yang aktif di sektor sipil. sebelumnya ABRI sudah pula mengurangi perwakilannya di parlemen. Menurut pemimpin ABRI, ini bagian dari komitmen ABRI untuk mengikuti gerak reformasi.

Namun masih belum jelas benar apakah ini perubahan dalam gradasi Dwi Fungsi ABRI ataukah perubahan bertahap menuju ideologi ABRI yang baru. Jika ini hanya perubahan gradasi, berarti tidak akan ada perubahan ideologi ABRI. Dengan kata lain, ABRI masih akan tetap berpolitik walau tidak seluas dan seintensif dulu.

Tapi jika ini gejala perubahan ideologi ABRI secara bertahap, ada kemungkinan ABRI akan keluar dari politik, menjadi tentara profesional, sebagaimana layaknya di negara demokrasi modern.

Di negara berkembang yang bertransisi menuju demokrasi, ada dua jenis perubahan ideologi militer. Pertama, model perubahan ideologi yang dialami tetangga kita Filipina. Kedua, model Turki. Model Filipina, setelah jatuhnya Marcos, secara bertahap akhirnya militer meninggalkan politik. Namun dalam model Turki, setelah empat puluh tahun menyelenggarakan pemilu demokratis, militer tetap saja berpolitik. Apakah Indonesia akan menjadi seperti Filipina atau Turki?

Filipina dan Turki memiliki ideologi militer yang berbeda. Filipina adalah bekas koloni Amerika Serikat yang kuat dalam tradisi supremasi sipil. Di era Marcos, tentara memang dilibatkan dalam politik, namun hanya menjadi partner yunior belaka, bukan pemain dominan. Setelah tumbangnya Marcos, tentara dengan lebih mudah dapat digiring kembali ke barak.

Namun Turki tidak pernah kuat dengan tradisi supremasi sipil. Turki adalah negara peradaban Islam yang mendalam. Kemal Ataturk, bapak Turki Modern, ingin merubah Turki menjadi negara modern yang sekuler, bukan negara Islam. Secara khusus militer diberi peran politik untuk menjaga kelangsungan negara sekuler itu. Tak ada pengawal lain yang lebih kuat dari militer untuk menjaga negara sekuler Turki dari aspirasi negara Islam kekuatan politik lain. Peran politik militer di Turki menjadi sedemikian strategisnya.

Militer di Indonesia kini agaknya di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada desakan kuat agar ABRI keluar dari politik. Lalu Indonesia mengikuti negara Filipina untuk berdiri di atas prinsip supremasi sipil. Negara tetangga kita lainnya seperti Malaysia dan Singapura juga melarang militer berpolitik. Apalagi di negara demokrasi Barat. Tak ada satupun militer yang terlibat politik.

Tapi di sisi lain, agaknya ada kekhawatiran di lingkungan pemimpin ABRI akan terjadinya disintegrasi bangsa akibat konflik etnik, ras dan agama yang serius di Indonesia. Kasus Ketapang, Ambon dan Sambas akan

terus menjadi bayangan buruk. Sementara ancaman kembalinya aspirasi negara Islam juga belum sepenuhnya dianggap hilang.

Sebagaimana di Turki, alasan ini dapat membuat ABRI ingin tetap berpolitik dengan misi khusus dan penting. Yaitu menjaga negara kebangsaan Indonesia yang utuh dan tidak berubah menjadi negara agama. Turki menjadi kiblat ABRI.

Apapun yang akhirnya dipilih oleh pemimpin ABRI, sebagai akademisi , tugas kita hanya mengingatkan dilema yang terjadi jika militer tetap berpolitik. Berdasarkan literatur demokrasi, ada tiga kesulitan besar, jika militer masih tetap berpolitik. Turki juga menghadapi kesulitan ini.

Pertama, militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik. Negara demokrasi mempunyai banyak partai politik. Jika partai politik itu berkompetisi secara politik, akan ada partai politik yang menang dan yang kalah. Partai yang menang akan mengendalikan pemerintahan, sementara partai yang kalah akan menjadi oposisi.

Namun negara demokrasi hanya punya satu korps militer. Jika militer dikalahkan secara politik, mustahil militer menjadi oposisi. Keamanan negara dan monopoli senjata perang berada di tangan militer. Apa jadinya jika militer menjadi oposisi dan dikalahkan secara politik? Jika militer dibiarkan terlibat dalam politik, maka sistem kompetisi politik akan rusak. Padahal kompetisi politik adalah elemen penting demokrasi.

Kedua, militer yang terlibat politik akan mendistorsikan atau merusak kebijakan politik. Negara demokrasi memisahkan secara tegas antara pengambil kebijakan politik dan pelaksana kebijakan politik. Pengambil kebijakan politik diserahkan kepada partai yang menang pemilu. Semua pihak dimungkinkan mengambil kebijakan politik negara dengan cara mengikuti dan memenangkan pemilu.

Sedangkan pelaksana kebijakan politik diserahkan kepada aparatus negara, dalam hal ini adalah birokrasi dan militer. Karena sifatnya sebagai aparatus negara, militer dinetralkan secara politik.

Jika sebagai aparatus negara, militer juga berpolitik, apa jadinya jika politik militer berbeda dengan partai yang memenangkan pemilu? Bayangkan jika pemimpin partai yang menang pemilu memiliki kebijakan politik A. sedangkan militer sebagai pelaksana di lapangan memiliki kebijakan politik yang anti A, maka warna kebijakan politik itu akan dirusak pada tingkat pelaksanaannya.

Ketiga, militer sudah ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Jika militer juga diberikan peran politik, militer dapat menjadikan keamanan negara itu sebagai kartu truf dalam rangka bargaining politik. Keamanan dan kerusuhan itu dapat digoyang-goyang dalam rangka bargaining politik. Ini jelas membahayakan keselamatan Negara.

Saatnya pemimpin ABRI menegaskan model atau grand design reformasi internalnya. Apakah ABRI memilih Filipina atau Turki? Jika ABRI ingin mengikuti arus dunia, tentu model Filipina itu yang harus dijadikan pilihan. Kemudian pemimpin ABRI membuat jadwal waktu yang ketat dan dikontrol kapan ABRI akan keluar dari politik.

Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 adalah warga dunia dan tidak terisolasi dari kecenderungan global. Di seluruh dunia yang maju secara ekonomi, ataupun yang bersih pemerintahannya, militer tidak terlibat politik.

5

Konsensus Elit dan Politik Massa

Sebuah karikatur dibuat untuk melukiskan kondisi demokrasi di Amerika Serikat. Dikatakan, dalam poll pendapat, 379 remaja menduga bahwa Ronald Reagan adalah nama sebuah rock band. Sebanyak 46% percaya bahwa Uni Soviet adalah nama sebuah perusahaan perdagangan. Sejumlah 57% tidak dapat berkomentar tentang Vietnam. Mereka menduga, Vietnam adalah istilah yang ada hubungannya dengan sex.[14]

Karikatur ini secara humoris menggambarkan apa yang sekarang berputar dalam kesadaran public AS. Apatisme dalam politik, yang tergambar dalam minimnya pengetahuan tentang tokoh dan peristiwa

14 Thomas R. Dye, Harmon Zeigler, The Irony of Democracy (USA: Brooks/ Cole Publishing Company, 1990; hal. 132)

politik, sudah menggejala dan sampai pada tingkat yang menggelikan.

Namun yang mengagetkan adalah kesimpulan yang dibuat oleh sang penulis. Justru sikap apatisme di kalangan massa ini yang membuat demokrasi di Amerika Serikat bertahan. Seandainya bersandar kepada rakyat banyak, demokrasi di AS itu sudah lama menghilang.

Tak seperti dugaan popular selama ini, demokrasi zaman yang kompleks dan anonim seperti sekarang sudah ironi. Rakyat banyak, bahkan di AS sekalipun, bukanlah pendukung demokrasi. Dari poll pendapat yang dibuat, menggambarkan bagaimana massa bukan saja tidak banyak peduli dengan kebijakan publik. Mereka bahkan dapat menjadi anti terhadap nilai dasar dan mental demokrasi itu sendiri, seperti pluralisme, toleransi dan sikap fair dalam bertindak.

Pendapat massa dalam poll pendapat atas kebijakan tertentu yang dibuat pemerintah, adalah semu belaka. Menurut sang penulis, umumnya mereka tidak pernah memikirkan kebijakan tersebut. Mereka beropini hanya karena diwawancarai. Dan opini mereka pun sangat goyah. Jika ditanyakan lagi persoalan yang sama dengan bahasa yang berbeda di kemudian hari, pendapat mereka acapkali berubah.

Penulis buku ini pun membuat kesimpulan yang kontroversial: para elitlah yang membuat sistem demokrasi di AS bertahan. Para elit ini bukan saja pemilik kekuasaan yang sebenarnya, tetapi pendukung

kultur demokrasi itu sendiri. Dan massa, semakin mereka apolitis semakin baik. Itu berarti mereka tidak menerjemahkan keawanan dan sikap intoleransinya ke dalam gerakan politik.

****

Dalam ilmu, kita mengetahui bahwa teori yang memihak kepada dominasi kaum elitis dalam sistem kemasyarakatan adalah teori elitisme. Ketika teori ini dioperasionalkan ke dalam sistem demokrasi, ia menjadi sistem demokrasi elitis.

Demokrasi elitis dianggap evolusi paling akhir dari prinsip demokrasi populer. Jika dalam demokrasi popular kekuasaan dititahkan kepada rakyat secara menyeluruh, dalam demokrasi elitis kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya mempunyai kekuatan sebagai pendukung: memilih siapa dari kelompok elit itu yang sebaiknya memerintah masyarakat.

Realitas politik menyebabkan sistem demokrasi popular mengalami distorsi. Dalam realitas yang kongkret bagaimanapun kekuasaan berhubungan dengan penguasaan sumber daya, baik yang bersifat informasi, ekonomi ataupun jabatan organisasi politik. Dalam sistem yang sangat kompetitif, dengan sendirinya sekelompok elit selalu memenangkan perebutan sumber daya itu. Modal dasar para elit ini memang sudah berbeda dengan rakyat kebanyakan.

Namun penulis buku ini hendak pergi lebih jauh dari pernyataan di atas. Dominasi kaum elit dianggap

bukan saja tidak terhindarkan berdasarkan ukuran realitas politik, tetapi juga diharuskan berdasarkan ukuran moral. Penelitian kuantitatif yang dilakukan di AS belakangan ini menunjukkan bahwa memang kaum elit inilah yang menghayati sistem demokrasi di negara tersebut.

Bagi mereka yang sejak semula meletakkan hati kepada rakyat kebanyakan, yang secara kental berkomitmen kepada prinsip demokrasi populer, agak gentar menghadapi kenyataan itu. Terlebih lagi jika membayangkan sistem politik di Tanah Air akan berevolusi ke dalam bentuk yang serupa akibat bekerjanya hukum-hukum sosial yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh sekelompok kekuatan.

Namun, seandainyapun dominasi elit tidak terhindarkan dalam realitas politik, persoalannya kemudian bagaimana membuat mekanisme politik elit yang paling menguntungkan rakyat secara menyeluruh. Dirumuskan secara tegas bagaimana membuat mekanisme, sehingga sungguhpun wilayah politik sepenuhnya didominasi kaum elit, namun elitisme ini dapat mengelola konflik yang terjadi, tidak kehilangan komitmennya kepada kepentingan publik dan selalu membuka diri kepada penyempurnaan sistem.

****

Sistem politik di AS menjawab persoalan di atas dengan dua strategi. Pertama adanya kesepakatan fundamental di kalangan elit atas sistem dan nilai

yang berlaku. Sungguhpun konflik dan perbedaan di kalangan elit sangat keras dan tinggi, namun mereka selalu bersepakat dengan prinsip dasar. Mereka secara bersama menjadi pendukung dari prinsip hak milik pribadi. Mereka pun bersepakat tentang pentingnya pemerintahan yang bersih, terbatas dan terkontrol. Tak kalah pentingnya mereka bersepakat tentang keberagaman dan hak individu menentukan nasibnya sendiri.

Kesepakatan ini dituangkan dalam undang-undang. Dengan prinsip supremasi hukum, kesepakatan ini menjadi kokoh dan terlembaga. Setiap elit yang mencoba keluar dari kesepakatan akan dilawan oleh kekuatan sistem secara menyeluruh.

Perlu digarisbawahi, kesepakatan ini menjadi lebih kokoh lagi karena sistem yang disepakati bersifat akomodatif, dapat menampung segala kepentingan dan perbedaan way of life. Mayoritas elit berusaha mempertahankannya karena kepentingan mereka yang plural melekat dalam aturan main itu.

Hal ini berbeda dengan India, misalnya. Sungguhpun negara ini mempraktekan prinsip demokrasi yang sama, namun terjadi konflik mendasar di kalangan para elit. Sebagian elit, sebagai contoh, menginginkan negara sekuler, sebagian lagi menginginkan negara agama. Ketidaksepakatan elit atas nilai mendasar ini, membuat Indonesia selalu dirundung konflik yang ganas.

Kedua, adanya akses publik/massa untuk mempengaruhi sirkulasi elit. Sungguhpun massa tidak memiliki kekuasaan riil, namun mereka memiliki berbagai asosiasi yang dapat mempengaruhi kebijakan. Berbagai pimpinan asosiasi, mengatasnamakan anggotanya, dapat menjadi penekan yang efektif terhadap kebijakan publik.

Mereka pun menentukan siapa diantara elit itu yang lebih pantas untuk mengendalikan pemerintahan. Walaupun bukan massa itu sendiri yang memerintah, karena menentukan, mereka dapat membuat para elit berlomba menyuarakan kepentingan mereka. Hal ini paralel dengan para produsen yang berlomba menarik simpati konsumen. Akibatnya para produsen dapat menghasilkan produk yang kompetitif dalam sistem persaingan bebas, yang lebih berkualitas, lebih murah dan lebih menguntungkan konsumen sendiri.

Dua watak ini membuat kebijakan public di AS bersifat pro kepada kemajemukan, partisipasi dan perbaikan sistem.

Fragmentasi elit di Indonesia lebih beragam dan tajam dibandingkan elit di AS. Yang riskan, konflik itu tidak hanya terjadi mengenai apa yang baik buat masyarakat, tetapi juga prosedur penyelesaian konflik. Prosedur demokrasi belum sepenuhnya diterima oleh elit yang berpengaruh. Isu agama dan isu gender (pria dan wanita) bahkan di era reformasi misalnya masih sering digunakan untuk mendiskriminasikan kesempatan sosial bagi pihak lawan politik di ruang publik.

Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 tidak bisa tidak mesti menjadikan prosedur demokrasi sebagai konsensus elit untuk menjadikan aturan main kompetisi dan penyelesaian konflik. Dalam prosedur demokrasi itu, semua warga negara menerima kesempatan dan perlakuan sosial yang sama di ruang publik, terlepas dari jenis kelamin, ras etnis, warna kulit dan agama yang dipeluk.

6

Memperbanyak Artikulator Politik

Tak ada yang mempesonaku, ujar Voltaire, daripada menyaksikan berbagai ide yang berbeda saling bertarung dan menggempur. Apa yang dinyatakan Voltaire (1694-1778) ini menggambarkan spirit zaman pencerahan, ketika berbagai persepsi atas pengalaman besar manusia ditulis ulang. Berbagai ide baru dilahirkan, bersinergi dan meletupkan dinamika yang turut menyumbang berdirinya peradaban modern.

Jika Voltaire kini berada di Tanah Air dan membaca surat kabar, mendengar radio serta menonton televisi kita, apakah yang akan dikatakannya? Tentu ia akan menemukan banya berita. Namun perdebatan, berbagai visi politik atau filsafat sosial mengenai masalah kemasyarakatan yang tengah kita hadapi akan sangat jarang ditemuinya.

Sudah seragamkan aspirasi politik kita, sebagaimana yang tergambar dalam media massa? Agaknya ada yang hilang, yaitu absennya para artikulator politik yang merepresentasikan keberagaman kesadaran politik kita ke dunia publik.

****

Ada yang unik dalam acara CSPAN pertengahan Desember 1994. Anggota Kongres dari Partai Republik yang memenangkan pemilu, pria dan wanita, membuat perayaan. Mereka menyerahkan penghargaan kepada tokoh yang dianggap sangat berjasa bagi kemenangan kelompok konservatif di seluruh AS. Tokoh ini ternyata bukan seorang pemimpin politik, bukan pula konseptor atau scholar, tetapi seorang penyiar radio dan televisi: Rush Limbaugh. Apa hubungan seorang penyair dengan kemenangan partai?

Rush Limbaugh dianggap artikulator politik masyarakat AS yang paling ampuh masa itu. Talk shownya di radio disiarkan oleh sekitar 600 stasiun. Sedangkan program televisinya (ABC) merupakan yang paling popular dan melampaui show David Letterman yang legendaris. Buku pertama yang ditulisnya, The Way Things Ought to Be, tercatat sebagai best seller dengan penjualan lebih dari 2,5 juta kopi selama kurang dari setahun. Ini buku yang paling laku dalam sejarah penerbitan Simon & Shuster Inc. untuk jenis non fiksi.

Buku keduanya, See I Told You So, mencetak rekor yang lebih fantastis. Ia memecahkan rekor seluruh

penerbitan dalam bahasa Inggris. Sementara newsletter yang dikelolanya Limbaugh Letter menjadi publikasi (start-up publication) yang paling laku dalam sejarah.

Saat itu, dari hari Senin sampai Jumat, ia mengudara di radio selama 3 jam dalam siaran langsung. Malam harinya, ia muncul di televisi selama setengah jam, juga siaran langsung. Acara ini spontan, penuh humor dan segar. Yang dibahas di semua saluran komunikasi itu adalah politik. Tepatnya, ia memasarkan dan menularkan ide-ide conservatism yang menjadi platform Partai Republik.

Ia memulai programnya dengan cuplikan berita aktual. Umumnya ia kemukakan lebih dahulu pendapat tokoh Partai Demokrat, entah itu Presiden Clinton dan First Lady Hillary, Al Gore atau politisi yang liberal. Lalu ia memberikan respon, membalikkan opini, mengolok-olok, membuat humor yang memasukan opininya sendiri yang konservatif. Program televisinya selalu panas, diwarnai oleh gelak tawa dan tepuk tangan penonton.

Pemilu 8 November 1994 dimenangkan secara telak oleh Partai Republik. Conservatism kembali mendominasi politik AS. Untuk pertama kalinya sejak lebih dari 20 tahun, Partai Republik memperoleh mayoritas dalam nation's governorship dan mengontrol lebih dari 17 state legislative chambers. Untuk pertama kalinya sejak lebih dari 40 tahun, mereka mengontrol kongres, the Senate dan the House sekaligus.

Program radio dan televisi Rush Limbaugh dianggap berada di belakangan kemenangan besar ini. Ia diklaim telah membimbing opini publik untuk memilih calon partai Republik. Bukunya See I told You So, dinilai Frank Wilson sebagai presentasi terbaik dari popular conservatism sejak buku Barry Goldwater, Conscience of a Conservative.

****

Sebagai artikulator politik, Rush Limbaugh sebenarnya hanyalah seorang komunikator, yang menjembatani dua dunia, yaitu dunia para filsuf dan akademis di satu pihak dan dunia masyarakat awam di pihak lain. Para filsuf menciptakan filsafat dan akademisi membuat riset. Tujuan mereka adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Pembaca mereka segelintir masyarakat akademis dan peminat yang minoritas.

Sedangkan tujuan seorang komunikator adalah sosial, membentuk opini publik. Ia menerjemahkan kerja para filsuf dan akademisi agar diminati publik yang lebih luas. Maka ia bungkus prinsip pengetahuan itu dengan mengkaitkan problem aktual yang tengah dihadapi masyarakat banyak. Bahasa yang digunakan pun cukup popular dan segar. Melalui seorang komunikator, prinsip pengetahuan itu dapat dikonsumsi oleh publik.

Namun Rush Limbaugh berbeda dengan komunikator biasa yang netral. Ia berpihak. Sebagai seorang ideolog, ia menawarkan visi. Ada sebuah platform politik yang mendasari dan menjadi benang merah seluruh opininya.

Komitmen pada visi itu memberikannya nuansa emosi yang justru lebih menyentuh pemirsanya. Lebih jauh lagi, ada sebuah partai politik yang juga percaya kepada ide yang ia kemukakan. Dukungan Partai Republik ini membuat Rush Limbaugh powerful.

Besarnya pengaruh Rush Limbaugh ini terlihat dari respon Partai Demokrat. Mereka tengah mencari sejenis Rush Limbaugh versi liberal untuk mendukung platform partai mereka.

****

Punyakah kita artikulator politik sejenis Rush Limbaugh di Tanah Air? Kita memiliki jenis yang serupa tetapi berbeda, seperti Zaenuddin MZ. Sebagaimana Limbaugh, Zaenuddin juga memiliki pendengar yang massal fanatik. Namun Kiai Zaenuddin juga semata berdakwah agama yang lebih berbicara tentang way of life seorang muslim. Ia tidak menyentuh ideologi modern untuk menata sistem sosial politik. Tak ada pula partai politik yang berdiri di belakang Zaenuddin.

Agaknya ada yang kosong dalam media kita. Publik teralienasi dari visi politik yang disampaikan di media populer secara terus menerus dengan bahasa yang segar dan problem yang aktual. Kita punya banyak intelektual yang memiliki misi namun jarang muncul di media publik.

Absennya artikulator politik yang beragam ini tidak dapat dipisahkan dari cara kita menangani perbedaan politik. Ada tiga respon terhadap perbedaan politik.

Pertama, respon yang berbentuk konflik. Respon ini melihat perbedaan politik sebagai pertentangan, pertentangan sebagai permusuhan, dan permusuhan berakhir dengan tindakan untuk saling memusnahkan.

Kedua, respon represi seperti di era Orde Baru. Respon ini melihat perbedaan politik sebagai tabu. Karena itu ia menyelesaikannya dengan menunggalkan pandangan politik. Sebuah pandangan politik dikedepankan dan pandangan lain direpresi secara paksa untuk tidak tampil ke permukaan.

Respon represi dapat menyebabkan stabilitas politik begitu terjaga akibat pandangan politik yang relative diseragamkan. Terlebih lagi jika penjaga stabilitas itu adalah kekuatan yang sangat dominan dimana kekuatan lain dibuat tidak mampu untuk mengimbangi.

Namun respon represi ini dengan mudah tergelincir ke dalam personalisasi kekuasaan. Muncul sebuah kekuatan tunggal atau pribadi tunggal yang tidak dapat lagi dikontrol oleh sesuatu di luar dirinya. Akibatnya kesalahan kebijakan publik atau kesewenangan, jika dilakukan oleh kekuatan dominan itu sangat sulit untuk dikoreksi.

Di sisi lain, respon represi ini gagal menyerap efek positif dari perbedaan politik. Di samping dapat saling menghancurkan, perbedaan politik dapat pula saling memperkaya, saling mengontrol, dan saling mendesak maju.

Ketiga, respon kompetisi. Respon ini melihat perbedaan politik secara lebih realistik dan optimis. Oleh karena perbedaan politik tidak dapat dihilangkan di zaman yang kompleks seperti ini, maka ia harus didekati secara pragmatis: bagaimana mengambil keuntungan dari perbedaan politik itu untuk kemajuan system secara menyeluruh. Dikembangkanlah mekanisme makro, hukum dan etik yang mengontrol kompetisi itu.

Kompetisi visi politik secara terbuka adalah solusi terbaik bagi perbedaan politik. Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 mestinya menjadi dunia yang diidealkan Voltaire. Yaitu dunia dimana berbagai ide bertarung secara bebas, cerdas dan santun.

BAB 3

MEMILIH PLURALITAS

1

Negara yang Netral dan Sekuler

Satu topik penting yang harus dibicarakan secara terbuka dan rinci di era transisi ke demokrasi paska gerakan reformasi 1998 adalah masalah hubungan agama dan negara. Bagaimanakah sebaiknya posisi agama dalam kehidupan bernegara? Topik ini tidak kalah pentingnya dengan topik amandemen konstitusi, Dwi Fungsi ABRI, otonomi daerah dan krisis ekonomi.

Setidaknya ada dua alasan mengapa topik agama dan negara itu penting. Pertama, isu itu ternyata terus hidup dan menarik emosi publik. Ini tidak mengherankan karena goresan agama dalam masyarakat kita sangat dalam. Kedua, di kalangan elit sendiri yang berpengaruh, agaknya belum ada kesepakatan bagaimana seharusnya posisi negara atas pluralitas agama di orde demokrasi.

****

HA Sumargono membuat catatan berjudul membuat catatan dengan judul "Isu Agama dan Sekularisme Politik," di harian Kompas 15 Juni 1999. Catatan yang ditulis Sumargono itu adalah tanggapan atas tulisan saya sebelumnya. Sebelumnya saya menyatakan bahwa gerakan reformasi dan negara adalah proyek bersama yang melampaui batas dan sekat agama. Karena ia proyek bersama, dua hal penting untuk ditekankan.

Pertama, sudah menjadi kenyataan bahwa warga negara di zaman modern ini datang dari kultur yang beragam. Namun kenyataan pula bahwa sebagai warga negara, mereka mesti mendapat perlakukan dan kesempatan sosial yang sama, terlepas dari identitasnya (warna kulit, jenis kelamin, ras, ideologi ataupun agama formal). Ini hanya mungkin terjadi jika negara bersifat netral terhadap keberagaman itu. Untuk soal keberagaman agama, negara mesti disekulerkan atau tidak menjadi instrumen agama tertentu saja. Apapun agama formal seseorang harus tidak menjadi isu dalam pertarungan jabatan publik yang memang terbuka untuk semua warga negara.

Kedua, pergeseran isu yang menghadapkan Islam versus Nasionalis Sekuler seperti yang ramai muncul menjelang pemilu 1999 adalah kontra produktif. Dikotomi yang harus dibuat bukan Islam versus Nasionalis Sekuler, tetapi kaum reformis versus kaum status quo. Tidak produktif menjadikan agama formal sebagai sekat politik, karena apapun agama

formal seseorang, ia mampu mendukung sistem yang demokratis ataupun otoriter. Dikotomi kaum reformis melawan kaum status quo lebih esensial karena memang agenda reformasi yang seharusnya menjadi pembeda pengelompokan politik.

HA Sumargono memberikan catatan kritis atas dua proposisi yang saya kemukakan di atas. Keberatan diajukan Sumargono baik untuk konsep negara sekuler ataupun dikotomi reformis versus status quo.

Isu pertama yang sentral yang perlu saya tanggapi adalah masalah politik sekuler. HA Sumargono tidak menyetujui aplikasi politik sekuler itu dalam kehidupan politik kongkret. Negara yang netral dan tidak memihak pluralitas agama warganya, menurut Sumargono, hanya ada di angan-angan. Dalam bahasanya sendiri, ia mengatakan: "Contoh-contoh faktual yang terjadi di Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa negara sekuler justru menindas Islam." Sumargono juga mengatakan: "Jadi pengalaman sejarah menunjukkan, bahwa ide sekularisme dan lain-lain lebih merupakan trik politik, agar umat Islam lain-lain tidak peduli dan jauh dari agamanya."

Saya menghargai dan turut menghayati keprihatinan Sumargono, namun kritik yang ia berikan adalah salah alamat. Sumargono melupakan satu kenyataan. Yaitu, memang semua negara demokrasi adalah negara sekuler, namun tidak semua negara sekuler itu adalah negara demokrasi. Banyak pula negara sekuler yang adalah negara otoriter atau negara semi demokrasi. Represi

atas kehidupan beragama terjadi bukan disebabkan oleh sifat sekuler, tetapi oleh watak otoriter atau watak semi demokrasi dari negara itu.

Dari tiga kriteria negara demokrasi sekuler: berlakunya kompetisi politik, partisipasi politik dan perlindungan hak asasi (civil liberties), tidak ada satu ahli politik pun yang mengkategorikan negara Indonesia, baik Orde Lama atau Orde Baru, sebagai negara demokrasi. Turki pun hanya dikategorikan sebagai negara semi demokrasi atau electoral democracy,karena masih berperannya militer dalam politik.

Di negara yang otoriter atau semi demokrasi itu, tidaklah heran jika terjadi represi atas kehidupan agama. Lebih jauh lagi represi itu terjadi juga untuk bidang politik lainnya secara umum. Di era Orde Baru, sebagai misal. Kebebasan pers dipasung. Kebebasan berorganisasi, seperti hak untuk mendirikan partai politik, juga diingkari. Namun sekali lagi ini terjadi bukan karena Orde Baru adalah negara sekuler, tetapi karena Orde Baru adalah negara otoriter.

Dalam negara demokrasi yang sekuler, kehidupan beragama dilindungi karena ia bagian dari hak asasi yang merupakan satu elemen dari definisi demokrasi itu sendiri. Perlindungan negara demokrasi sekuler atas kebebasan beragama dan kesetaraan beragama bukan hanya di angan-angan saja, seperti yang diduga oleh Sumargono. Perlindungan itu dapat diteliti secara empiris.

Banyak lembaga dengan reputasi internasional yang sudah melakukan riset dengan metodologi dan ukuran yang ketat akan praktek hak asasi, termasuk kebebasan dan equal treatment atas pluralitas agama. Ini dimaklumi mengingat demokrasi dan hak asasi adalah topik yang hangat pula di dunia akademis. Kebebasan beragama dan hak asasi manusia pada umumnya paling dilindungi di negara demokrasi sekuler ketimbang di negara otoriter ataupun negara yang berbasiskan agama. Ini adalah fakta!

Di negara demokrasi sekuler, jangankan agama mayoritas, agama minoritas pun diberikan hak sama untuk menduduki jabatan publik setinggi presiden. Amerika Serikat, misalnya, adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Protestan. Namun Kennedy yang beragama Katolik pernah pula menjadi presiden di negara itu. Kennedy bahkan termasuk presiden AS yang paling popular dan sukses dalam sejarah AS yang lebih dari 200 tahun. Hal ini tidak masalah karena mayoritas pemilih itu sendiri yang sudah menentukannya melalui pemilu. Jika agama minoritas saja diberikan treatment yang sama dan dilindungi, tentunya apalagi agama mayoritas.

Hal lain yang dikhawatirkan oleh HA Sumargono adalah penghilangan sentimen agama dalam politik jika prinsip politik sekuler dijalankan. Dalam bahasanya sendiri: "Menghilangkan sentimen agama dalam politik tidak mungkin dilakukan bahkan di negara-negara Barat sekalipun."

Sekali lagi ini merupakan kesalahpahaman selanjutnya dari Sumargono atas konsep negara demokrasi sekuler. Tak ada satupun negara demokrasi sekuler yang menghilangkan sentimen agama dalam politik. Tindakan itu bertentangan dengan hak asasi, padahal hak asasi adalah salah satu elemen dari konsep negara demokrasi itu sendiri.

Negara demokrasi yang sekuler membolehkan setiap warga negara mempengaruhi politik. Untuk mempengaruhi politik, sang warga negara itu boleh menggunakan persepsinya sendiri, atau ideologi ataupun keyakinan agama. Menghilangkan sentimen agama dalam politik adalah tidak perlu dan mustahil.

Yang dilarang dalam prinsip negara demokrasi sekuler adalah menggunakan negara untuk menjadi instrumen atau aparatus agama tertentu saja. Ini dilarang karena melanggar netralitas negara dalam agama dan melukai perlakukan sama yang harus diberikan negara atas pluralitas agama.

Negara mengambil jarak yang sama tidak hanya kepada keberagaman agama, tetapi juga keberagaman interpretasi satu agama. Sebagai contoh, soal isu boleh tidaknya seorang wanita menjadi presiden. Ulama dari agama Islam mempunyai berbagai interpretasi yang berbeda. Ulama yang satu menolak, sementara ulama lainnya mendukung.

Negara memposisikan dirinya untuk tidak mencampuri debat internal dalam interpretasi agama di kalangan Islam. Itu adalah urusan komunitas Islam dan negara

tidak menundukkan diri kepada interpretasi manapun. Negara, dalam konsep demokrasi, menundukkan diri pada hukumnya sendiri yang memberikan hak yang sama kepada semua warga, apapun jenis kelamin dan agamanya, sejauh dipilih melalui prosedur demokrasi.

Singkat kata, kritik dan kekhawatiran HA Sumargono atas konsep dan praktek demokrasi sekuler lebih disebabkan oleh kesalahpahaman Sumargono atas konsep dan prakteknya.

****

Hal kedua yang ingin saya tanggapi adalah soal pentingnya dikotomi kubu reformasi versus kubu status quo. Sumargono menyatakan dikotomi itu telah dipolitisir sedemikian pula. Dalam bahasanya sendiri: "Isu itu lebih merupakan jargon politik yang merugikan masa depan bangsa ini, ketimbang mencari penyelesaian dari berbagai persoalan politik dan ekonomi yang sedang melanda bangsa ini."

Saya menggarisbawahi adanya salah aplikasi di kalangan sebagian komentator dalam kategorisasi kubu reformis versus status quo. Label itu diberikan kepada partai dan tokoh. Jelaslah ini tidak tepat, karena dalam isu tertentu, satu partai dan sang tokoh berwatak reformis, namun dalam isu lainnya, partai dan tokoh yang sama itu dapat berwatak status quo.

Namun misaplikasi di kalangan sebagian komentator itu tidak berarti dikotomi itu tidak berguna, apalagi dicap berbahaya. Jika diaplikasikan dengan benar,

jelaslah dikotomi kubu reformasi dan kubu status quo tidak hanya berguna, tetapi juga menjadi alasan utama transisi ke demokrasi saat ini.

Reformasi dan status quo harus dilabelkan kepada tipe rezim. Status quo mewakili rezim otoritarian Orde Baru yang hendak dikoreksi. Sementara reformasi mewakili rezim demokrasi yang hendak dibangun. Perubahan tipe rezim ini memerlukan berbagai agenda, seperti pencabutan Dwi Fungsi ABRI, amandemen konstitusi, seluruh anggota parlemen yang dipilih, serta negara yang harus bersikap netral atas pluralitas agama. Hanya dengan agenda seperti itu, transisi ke demokrasi dapat berjalan.

Akan menjadi persoalan jika bukan agenda itu yang dikedepankan, tetapi politik identitas politisi. Yang dinilai dari seorang politisi akibatnya bukan visi atau kompetensinya, tetapi jenis kelamin, warna kulit, ras atau agama. Politik identitas ini berbahaya karena melupakan satu hal penting. Apapun jenis kelamin, warna kulit, ras atau agama seseorang, ia mampu membuat kebijakan yang berwatak demokratis ataupun yang berwatak otoriter.

Indonesia baru yang hendak kita bangunn paska gerakan reformasi 1998 adalah negara modern. Agar keberagaman warga negara yang memang tidak terhindari itu dihormati, hak-hak sosial mereka harus tetap diberikan secara equal. Untuk keperluan itu, tidak bisa tidak, negara memang harus dinetralkan dan disekulerkan.

2
Dukungan Agama

Agama, seperti yang dikatakan Will Durant, memiliki seribu nyawa. Ia selalu hidup dalam peradaban manusia, tidak pernah mati. Di satu kurun waktu, seperti di masa tengah Revolusi Industri abad ke-20, kehadirannya dapat memudar. Namun karena banyak nyawa, kini di zaman post-industri, di era gelombang ketiga, di musim postmodernisme, agama hidup dan mekar kembali.

Psiko-analisa dari Sigmund Freud itu masih diingat. Menurut Freud, pengalaman masa kanak-kanak seseorang akan terus mempengaruhi perkembangan orang itu sampai mati. Jika peradaban dianalogkan dengan pertumbuhan manusia, agama sudah hadir di masa kanak-kanak peradaban, sejak ribuan tahun lalu. Kisah Nabi Musa sudah terjadi sekitar 1000 tahun sebelum masehi.

Karenanya, adalah ilusi jika ada yang ingin mengabaikan peran agama dalam pembentukan sebuah sistem sosial. Terlebih lagi sistem sosial itu dibangun untuk Kawasan Dunia Ketiga, yang umumnya tergores sangat dalam oleh pengaruh agama. Melebihi ideologi sekuler, agama mempengaruhi psikologis penganutnya sampai batas terjauh dan terhalus. Interpretasi penganut atas agama, dan kesadaran sosial akibatnya, menjadi faktor yang sangat dominan.

****

Apakah yang menjadi akar gelombang demokratisasi yang besar dalam dekade ini? Jawaban atas pertanyaan itu acapkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Seymour Martin Lipset[15] misalnya, menyatakan ada korelasi yang kuat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi yang stabil. Negara yang kuat secara ekonomi akan segera, atau secara bersamaan, mengembangkan sistem politik demokratis. Pernyataan ini terasa benar jika merujuk berbagai negara di Barat.

Namun alasan ekonomi itu terasa tidak lagi memadai. Negara industri baru seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand ternyata tumbuh dalam jalur yang berbeda. Prestasi ekonomi yang luar biasa di berbagai negara itu tidaklah seiring dengan demokratisasi. Bahkan pertumbuhan ini sedikit banyak justru ditopang oleh sistem politik otoritarian. Seperti yang dikatakan Lee

15 Seymour Martin Lipset, Political Man : Social Bases of Politics (New York: Anchor, 1963)

Kuan Yew bahwa demokrasi dapat menjadi penghalang ekonomi yang efisien.

Factor lain niscaya turut pula berperan dalam gelombang demokratisasi. Samuel Huntington[16] mengeksplorasi kontribusi sebuah kultur, termasuk agama, terhadap gelombang itu.

Demokrasi menjadi mustahil tanpa adanya masyarakat yang percaya kepada kebenaran prinsipnya. Dikatakan secara berbeda: demokrasi menjadi mustahil tanpa adanya masyarakat yang secara potensial menolak sistem nilai otoritarian. Kepercayaan dan penolakan itu tidak diciptakan oleh perkembangan ekonomi, namun oleh kultur dan agama yang dihayati individu atau komunitas.

****

Ada studi tentang empat agama: Protestan, Katolik, Kong Hu Cu dan Islam, yang dikerjakan Huntington. Yang ingin ia ungkapkan adalah kontribusi agama itu bagi demokrasi. Huntington cukup positif kepada agama. Sungguhpun dalam penggalan sejarah terbukti adanya interpretasi agama yang menghalangi demokratisasi, namun ia membuka kemungkinan lahirnya interpretasi baru dari kalangan agama.

Protestan mewarnai gelombang demokrasi yang pertama, sejak tahun 1820-an sampai 1920-an. Negara yang menjadi demokratis masa itu umumnya didominasi

16 Samuel Huntington: "A New Wave of Democracy, Religion and Global Democracy", Current : December 1991

oleh pemeluk agama Protestan, mulai dari Amerika Utara sampai Eropa.

Ajaran Protestan atas kesadaran dan otonomi individu, seperti akses individu untuk langsung kontak dengan Sang Pencipta ataupun The Holly Writtne in The Bibble, bersifat compatible dengan paham kedaulatan individu dalam sistem demokrasi. Gereja Protestan pun terstruktur secara demokratis dengan menekankan partisipasi yang luas (supremacy of the congregation). Di samping itu, seperti yang ditulis Weber, etik Protestan telah mendorong tumbuhnya kapitalisme dan kesejahteraan ekonomi.

Katolik mewarnai gelombang demokrasi ketiga, sejak tahun 1970-an sampai kini. negara yang menjadi demokratis di periode ini, mulai dari Portugal, Spanyol, Amerika Selatan dan Tengah, Filipina, Polandia dan Hungaria, didominasi oleh para pemeluk Katolik.

Hubungan ajaran Katolik dan demokrasi sangatlah khusus. Sebelum tahun 1960-an, Katolik dianggap anti demokrasi, terlebih lagi jika dibandingkan dengan Protestan. Namun terjadi perubahan interpretasi agama yang mendasar sejak Pope John XXIII yang dikenal dengan Konsili Vatican kedua, 1962-1965. Vatican II ini menekankan perlunya para pendeta dan penganut Katolik terlibat secara sosial untuk membantu kaum miskin, mengakui hak-hak individual dan menarik legitimasi atas pemerintahan yang tidak adil dan otoritarian. Interpretasi baru ini memberi landasan kultural bagi demokratisasi secara sangat berarti.

Kong Hu Cu memiliki problem khusus dengan demokrasi. Berbagai Negara makmur baru di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura dan China, yang didominasi oleh penganut Kong Hu Cu, belum mengarah kepada demokrasi. Ada beberapa elemen dari interpretasi Kong Hu Cu yang menjadi penyebab. Ia lebih menekankan kepentingan kelompok ketimbang kedaulatan individu, otoritas ketimbang kebebasan, dan kewajiban ketimbang hak.

Namun selalu terbuka kemungkinan lahirnya para pembaharu yang menginterpretasikan kembali ajaran Kong Hu Cu sehingga selaras dengan prinsip demokrasi. Kong Hu Cu pun pernah dianggap Weber tidak selaras dengan kultur yang merangsang kemajuan ekonomi. Kini kenyataannya terbalik, berbagai negara yang didominasi kultur Kong Hu Cu di atas, menunjukkan kemajuan ekonomi yang begitu gemilang. Hal yang sama dapat terjadi di lapangan politik.

Sedangkan Islam, secara konseptual, banyak mengajarkan prinsip yang begitu progresif baik bagi demokrasi, keadilan ataupun kemajuan ekonomi. Prinsip seperti egalitarian, kedaulatan individu, kesalehan, kerja keras dan semangat mencari ilmu, bertaburan di Kitab Sucinya.

Problem terjadi agaknya di tataran praktis. Lahirlah jarak yang lebar antara doktrin Islam dan peradabannya. Akibatnya, di negara yang didominasi penganut Islam, mulai dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara dan

Timur belum mencoba pengalaman berdemokrasi yang panjang dan stabil.

****

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan. Semua agama pada dasarnya memberi landasan kultural bagi demokrasi dengan beberapa catatan kaki. Yaitu jika interpretasi atas agama menghargai nilai-nilai yang compatible bagi demokrasi. Antara lain: respek atas kedaulatan individu, perbedaan pandangan dan keberagaman; serta berani mengambil resiko terlibat secara sosial untuk mengupayakan tegaknya sistem yang adil. Dibutuhkan pula kelompok agama sebagai operator sistem nilai tersebut, yang menerjemahkannya ke dalam program sosial yang nyata.

Jika upaya perluasan demokrasi dan pluralism serta penarikan jarak dari sistem tiranik dianggap misi agama, dapat dibayangkan efek psikologisnya kepada individu pemeluk, ataupun kepada kelompok. Keyakinan ini dapat membuat sang pemeluk selalu mencari jalan untuk mentransendensi sistem otoritarian sekaligus meluaskan solidaritas ke sesama pejuang demokrasi lainnya.

Persoalannya, dunia nyata acap diliputi kisah sedih. Betapa banyak keburukan timbul dengan mengatas-namakan kebaikan. Awalnya adalah pemusatan kekuasaan. Kekuasaan yang semakin memusat ke satu tangan manusia, manusia yang selalu tidak sempurna, adalah akar keburukan itu, baik ia mengatas-namakan

ideologi sekuler ataupun agama. Kekuasaan memusat yang disokong ideologi sekuler saja susah dikoreksi, apalagi jika ia dilegitimasi oleh kelompok agama.

Transisi ke demokrasi di Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 akan kokoh jika agama di sini, terutama agama Islam yang mayoritas, diinterpretasikan secara lebih liberal, yang compatible dengan prinsip demokrasi dan hak asasi.

3
Dukungan Agama

Dapatkah seseorang menjadi penganut Islam yang taat dan sekaligus menjadi pendukung penuh sebuah sistem pemerintahan demokratis? Mungkinkah seseorang menerima Islam secara penuh serta meyakini demokrasi tanpa ada pertentangan dalam pikiran dan batinnya? Bisakah seseorang menerima konsep negara yang netral terhadap pluralitas agama, namun sekaligus menjadi seorang muslim yang penuh dedikasi? Tanpa posisi negara yang netral, negara tidak akan dapat memberikan pelayanan yang equal kepada warga negara yang agamanya beragam.

Pertanyaan ini penting untuk dielaborasi mengingat Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dan kini Indonesia tengah bertransisi menuju demokrasi. Jika

prinsip demokrasi tidak dihayati, misalnya karena dianggap bertentangan dengan prrinsip Islam, sistem demokrasi tidak akan mengakar di kalangan umat Islam. Ini berarti sistem demokrasi akan menjadi asing selamanya di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Umat Islam yang saleh tidak akan mendukung demokrasi jika ternyata mereka harus mengurbankan sebagian keyakinan agama mereka.

Sering ditekankan ada perbedaan karakter antara agama Islam dengan agama lain. Penganut agama lain, menurut paham ini, akan mudah menerima netralitas negara terhadap pluralitas agama. Namun Islam punya karakter tersendiri yang berbeda.

Misalnya dikatakan bahwa Orang Kristen Barat tidak menuntut diberlakukannya hukum Kristen di bidang pemerintahan dan ekonomi. Keterlibatan agama hanya boleh sebatas nilai moral dan acara ritual tertentu saja. Namun konsep netralitas seperti itu akan sulit diterapkan untuk agama Islam. Mengapa? Ini diklaim bahwa Islam tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi mengajarkan sistem akidah dan sistem hukum, termasuk hukum bidang tata negara dan pemerintahan serta ekonomi.

Jika logika paham ini diikuti, berarti seseorang tidak dapat menjadi penganut Islam yang penuh, namun sekaligus pendukung demokrasi yang menghendaki netralitas negara terhadap pluralitas agama. Untuk mendukung demokrasi, seseorang harus mengurbankan

sebagian keyakinan Islamnya. Atau, jika tidak ingin mengurbankan sebagian keyakinan Islam, ia harus tidak mendukung demokrasi sepenuhnya.

Tulisan ini hendak memberikan antitesis yang berlawanan dengan paham itu: bahwa seseorang dapat menjadi Muslim yang taat, dan sekaligus mendukung sistem demokrasi, yang tidak bisa tidak sistem itu pasti sekuler.

****

Kelemahan paham itu adalah ia melihat ajaran dan penganut agama secara homogen. Seolah-olah dalam setiap agama, hanya ada satu umat yang solid serta memiliki persepsi yang sama.

Paham itu membuat generalisasi seolah umat Kristen ada dalam satu suara menyikapi hubungan antara agama dan negara. Mereka menerima netralitas negara dalam pluralitas agama karena ajaran agama itu mendukung pemisahan negara dan gereja. Hal ini diklaim memang sesuai dengan doktrin injil: "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan."

Paham itu juga menyederhanakan Umat Islam seolah mereka juga memiliki sikap yang sama dalam isu hubungan agama dan negara. Karena merujuk kitab suci dan sejarah nabi yang sama, Umat Islam yang berpegang teguh pada agamanya, diklaim akan meyakini adanya kontradiksi antara ajaran Islam dengan prinsip netralitas negara dalam pluralitas agama.

Realitas yang ada jauh lebih kompleks daripada apa yang diklaim oleh paham itu. Semua way of life, apalagi agama yang sudah berusia lebih dari seribu tahun, adalah sebuah mozaik yang berwarna. Ada begitu banyak ketidaksepakatan internal dan keberagaman interpretasi dalam masing-masing agama itu.

Namun di AS sendiri, misalnya, tetap saja ada tokoh agama yang keras dalam Christian Coalition yang berpengaruh. Mereka percaya bahwa agama Kristen harus menjadi sokoguru pemerintahan AS. Pemisahan negara dan agama, menurutnya harus ditinjau kembali. Lebih ekstrem dari itu, ada pula kelompok KKK (Ku Klux Klan), yang percaya bahwa berdasarkan ajaran agamanya, mereka ingin membersihkan masyarakat AS bersih dari orang kulit hitam, Katolik dan Yahudi.

Argument bahwa orang Kristen Barat tidak menuntut diberlakukannya hukum Kristen di bidang pemerintahan adalah tidak sepenuhnya benar. Memang bagi penganut Kristen tertentu, netralitas negara terhadap keberagaman agama sudah diterima sebagai bagian dari keyakinan mereka. Ditambah lagi dengan kuatnya kultur demokrasi, netralitas negara itu tidak dipersoalkan.

Demokrasi di Barat menjadi terkonsolidasi, karena penganut Kristen yang liberal (mendukung demokrasi) lebih dominan dibanding paham Kristen yang ekstrem. Dominasi itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Di abad pertengahan, di era absolutisme, ketika penguasa negara dan penguasa agama ada di satu tangan, penganut

Kristen liberal adalah minoritas. Namun, bersamaan dengan datangnya era reformasi dan pencerahan, juga disebabkan oleh akibat buruk penyatuan agama dan negara, penganut Kristen liberal semakin meluas. Reinterpretasi atas agama dilakukan terus menerus.

Islam pun sebagai agama besar juga dilanda oleh heterogenitas yang sama. Banyak pemikir Islam yang beranggapan bahwa konsekwensi dari ajaran Islam menghendaki berdirinya negara Islam, dimana negara menjadi aparatus dari agama Islam saja. Netralitas negara terhadap keberagaman agama jelas bertentangan diametral dengan keyakinan ini.

Namun banyak pula pemikir Islam yang menginterpretasikan Islam secara berbeda. Satu yang terkenal adalah ulama berpengaruh Mesir, Abd al Raziq (1888-1966). Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama, bukan bentuk Negara; Islam adalah padangan hidup bukan bentuk pemerintahan; Islam adalah ajaran spiritual, bukan institusi politik. Dalam pandangan ini, menjadikan negara sebagai instrumen agama Islam tidak didukung.

Dalam komunitas Islam sendiri, di antara ulama dan pemikir besar, terjadi debat yang terus tidak berkesudahan. Yang satu mengedepankan Islam sebagai sistem politik alternatif yang berbeda dengan demokrasi Barat. Yang satu lagi menegaskan ketidakbertentangan (paralelisme) ajaran Islam dan sistem demokrasi yang

sekuler. Detail dari debat internal komunitas Islam ini dapat dibaca, misalnya dalam tulisan Fauzi M. Najjar.[17]

Kasus di atas menunjukkan bahwa yang membuat seorang penganut agama menerima atau menolak netralitas Negara terhadap keberagaman agama, bukan karena agama itu an sich, tetapi interpretasi atas agama itu. Dengan interpretasi tertentu, keyakinan agama membawa mereka harus menentang sistem demokrasi. Dengan interpretasi lainnya, keyakinan agama dapat membawa mereka mendukung sistem demokrasi. Ini terjadi di semua agama.

Penentang paham netralitas negara dalam pluralitas agama selalu ada di setiap agama, dan di setiap negara, bahkan di pusat demokrasi sekuler seperti di Amerika Serikat.

Sebaliknya pendukung paralelisme agama dengan sistem demokrasi juga ada di setiap agama, termasuk Islam. Negara demokrasi di Barat berhasil membuat penganut agama yang percaya dengan sistem demokrasi jauh lebih dominan daripada mereka yang menentangnya.

Transisi ke demokrasi di Indonesia akan pula jauh lebih mudah jika penganut dan pemimpin agama, terutama Islam, yang percaya dengan sistem demokrasi jauh lebih berpengaruh dan dominan daripada yang menentangnya. Penganut Islam yang berpotensial

17 Fauzi M. Najjar: "The Debate on Islam and Secularism in Egypt" (Arab Studies Quarterly, Vol 18, number 2, Spring 1996).

mendukung sistem demokrasi sudah banyak di Indonesia. Untuk mudahnya, mereka saya sebut saja sebagai kaum Islam substansialis, yaitu mereka yang memahami ajaran Islam secara substansial.

Istilah ini saya pinjam dari William Liddle.[18] Menurut Liddle ada empat ciri dari kaum substansialis ini di Indonesia. Pertama, mereka percaya bahwa isi dan substansi ajaran Islam jauh lebih penting daripada bentuk dan labelnya. Dengan menekankan substansi ajaran moral, sangat mudah bagi kaum substansialis ini untuk mencari common ground dengan penganut agama dan kaum moralis lainnya untuk membentuk aturan publik bersama.

Kedua, mereka percaya, walau Islam (Qur'an) itu bersifat universal dan abadi, namun ia tetap harus terus menerus diinterpretasi ulang untuk merespon zaman yang terus berubah dan berbeda. Zaman paska industri menjelang abad 21 ini jelaslah berbeda, secara ekonomi, politik dan kultur, dengan zaman ketika Islam pertama kali turun di era sebelum industri, lebih dari seribu tahun lalu.

Partai politik dan pemilu sebagai misal adalah produk masyarakat industri yang belum dikenal di abad awal kelahiran Islam. Demokrasi kini adalah kenyataan kecenderungan global yang harus dihadapi. Dengan terus menerus mengupayakan reinterpretasi ajaran

18 R. William Liddle: Leadership and Culture (Allen&Unwin Pty Ltd, 1996; hal 266-289).

agama, dan berpegang teguh pada substansi agama, paralelisme antara Islam dan modernitas akan terbuka.

Ajaran Katolik pun, sebagai misal, di abad pertengahan pernah diinterpretasi dalam cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sampai tahun 1970-an, Katolik sering dianggap kendala bagi tumbuhnya kultur demokrasi. Namun, karena adanya reinterpretasi terus menerus, oleh Samuel Huntington, Katolik kini dianggap turut menyuburkan dan menyebarkan demokrasi. Hal yang sama dapat terjadi di Islam.

Ketiga, mereka percaya karena keterbatasan pikiran manusia, mustahil mereka mampu tahu setepat-tepatnya kehendak Tuhan. Kemungkinan salah menafsir kehendak Tuhan harus terus hidup dalam pikiran mereka. Dengan sikap ini, mereka akan lebih bertoleransi atas keberagaman interpretasi dan membuat dialog dengan pihak yang berbeda.

Kompromi untuk hal-hal yang bersifat publik, yang mengatur kehidupan bersama, lebih mudah dilakukan. Kesediaan berkompromi adalah salah satu sokoguru demokrasi.

Keempat, mereka menerima bahwa bentuk negara Indonesia sekarang, yang bukan negara Islam, adalah bentuk final. Dengan keyakinan ini, mereka tidak akan berupaya mendirikan negara Islam, yang menjadikan negara sebagai instrumen agama Islam saja. Netralitas negara terhadap pluralitas agama di Indonesia akan sangat mudah diterima.

Dengan empat prinsip ini, seseorang dapat menjadi Muslim sekaligus demokrat. Dengan empat prinsip di atas, seseorang dapat menjadi penganut Islam yang penuh sekaligus juga menjadi penganjur sistem demokrasi yang gigih.

Tantangan kaum substansialis ini adalah bagaimana membuat interpretasi mereka atas ajaran Islam menjadi mainstream di Indonesia. Ini tidak kalah penting dengan agenda demokrasi lainnya.

4

Mengakhiri Diskriminasi Ideologi

Dalam debat yang terkenal di Larry King Show 1993, CNN, Wapres AS Al Gore memberi label lawan debatnya, Ross Perot, sebagai penganut The Politics of Fear. Yaitu sikap politik yang selalu merasa terancam dan takut menghadapi situasi baru dan perubahan. Kita dapat menggunakan term The Politics of Fear dalam pengertian yang lebih luas. Termasuk di dalamnya, adalah sikap yang penuh khawatir akibat berkembangnya imajinasi dan ilusi yang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya.

Menjadi ironi jika setelah gerakan reformasi 1998, kita di Tanah Air juga diwarnai oleh nuansa The Politics of Fear. Masih terasa ketakutan kita akan komunisme. Ketakutan itu kemudian cenderung berbentuk tindakan

diskriminatif terhadap mereka yang diduga sebagai penganutnya.

Mengapa Komunisme yang sudah ditumpas sekitar 30 tahun lalu masih bergelayut menghantui kesadaran kita? Di dekade 90-an ini, adakah komunisme sebagai ideologi masih menjadi ancaman? Adakah ketakutan kita tidaklah riel dan bersifat takhyul belaka? Bagaimana pula sistem politik modern menghadapi perbedaan ideologi?

****

Sebagai ideologi, di zaman ini komunisme sudah bangkrut. Dua pusat dunia komunisme, Rusia dan China, kini justru bergerak menuju kapitalisme. Patung Marx dan Lenin sudah diturunkan dari singgasananya. Seperti yang ditulis di A Dictionary of Modern Politics,[19] komunisme berarti dua hal. Pertama, ia adalah ide teoritis yang ditemukan dalam tulisan Karl Marx. Kedua, ia adalah prinsip pemerintahan yang historis di dunia modern yang diawali oleh Lenin.

Marx membayangkan lahirnya masyarakat ideal komunisme. Masyarakat itu, ia ilustrasikan sebagai kondisi dimana orang-orang bekerja hanya sampai siang hari, sore hari memancing dan malam hari diskusi mengenai filsafat dan membaca puisi. Ini sebuah bayangan masyarakat yang sudah terbebaskan dan bermartabat.

---

19 David Robertson, A Dictionary of Modern Politics (Philadelpia: Taylor and Francis 1985), hal 58-60.

Akar dari eksploitasi, menurutnya, adalah pemilikan alat-alat produksi secara pribadi. Hal ini lalu melahirkan kelas yang memiliki alat itu, dan kelas yang bekerja untuk mereka. Situasi ini membuat kelas pemilik bukan saja menyerap keuntungan dari keringat kelas pekerja, tetapi menciptakan pula situasi dominan. Kelas pekerja akan mengalami ketergantungan ekonomi, ketergantungan psikologi dan sistem nilai.

Masyarakat komunis, menurut Marx, adalah masyarakat yang tidak berkelas yang menghapus kepemilikan pribadi, dengan tingkat pemerataan tinggi. Negara dan pemerintah pun akan menghilang, karena semua manusia hidup dalam harmoni dan kerjasama, tanpa pembagian sosial yang menuntut hadirnya otoritas seperti negara itu.

Oleh Lenin, ide Marx ini diterjemahkannya ke dalam politik praktis. Bagi Lenin, harus ada situasi antara (mediasi) di tengah robohnya kapitalisme dan berdirinya masyarakat komunis. Fase ini disebutnya sosialisme yang membutuhkan kehadiran partai pelopor.

Dalam kenyataan historis, partai ini berkembang menjadi birokrasi raksasa yang secara efektif mengontrol masyarakat. Kontrol yang ketat ini diperlukan, menurut mereka, di samping buat membersihkan masyarakat dari ide-ide borjuis yang menentang terbentuknya masyarakat komunis, ataupun sebagai implementator ideologi yang akan menggiring publik ke “jalan yang benar”.

Birokrasi ini mengambil kebijakan ekonomi yang tersentral. Harga barang, sebagai misal, tidak ditentukan oleh mekanisme pasar tetapi oleh politik. Di masyarakat, tidak muncul para pengusaha besar, karena alat-alat produksi dikuasai oleh negara sebagai wakil rakyat secara keseluruhan.

Birokrasi menjadi selektor ide politik pula, yang menentukan mana yang boleh berkembang di masyarakat. Kebijakan itu berujung kepada sensor politik yang ketat dan penyeragaman pandangan.

Akhirnya, komunisme yang terbentuk di dunia nyata sangat berbeda dengan apa yang dilamunkan Karl Marx. Negara yang dianggap akan menghilang, dalam kenyataannya di dunia komunis justru bertambah besar dan melilit bagai gurita. Masyarakat yang dikira akan terbebaskan, justru akhirnya meronta mencari kebebasan dalam sistem sosial yang lain. Sistem ekonomi tidak efisien dan produktif,politik sangat menekan, sementara masyarakat lumpuh karena hidup dalam kekangan yang ketat

Di ujung dekade delapan puluhan, bagaikan rumah kartu, sistem pemerintahan komunisme pun roboh satu per satu. Ia roboh bukan karena dipukul secara politik, tetapi diluluhlantakkan oleh kenyataan yang semakin kompleks dan beragam. Kompleksitas dunia ekonomi tidak bisa lagi disentralisasi dan dikontrol oleh hanya satu pusat kekuatan, seperti oleh birokrasi pemerintah. Sementara penyeragaman aspirasi politik dipecahkan

oleh semakin berbedanya kebutuhan dan kesadaran berbagai segmen masyarakat.

Kecenderungan dunia justru mengarah kepada liberalisasi yang ditandai oleh dua hal. Pertama, semakin mengecilnya peran negara di sektor ekonomi dan politik, serta semakin besarnya mekanisme pasar. Robert Nozick menyebutnya sebagai “The Minimal State” , negara yang hadir dengan peran minimal. Kedua, semakin besarnya peran individu. Seperti yang disinggung Naisbitt dalam Global Paradox, semakin global ekonomi dunia, berparadoks dengan semakin besarnya peran individu dan unit kecil ekonomi. Jelaslah dua kecenderungan ini semakin jauh meninggalkan prinsip komunisme dengan birokrasi besar dan spirit kolektivismenya.

Tentu saja sentimen kepada rakyat jelata dan mereka yang lemah dan struktur masyarakat masih terus menggelora. Tapi spirit itu tidak lagi mengambil bentuk dalam ideologi ekstrem seperti komunisme. Ia kini diwakili oleh konsep welfare state. Yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang mengharap pemerintah lebih berperan dalam program kesejahteraan bagi kalangan bawah.

Dalam pertarungan ideologi, komunisme sudah menjadi sejarah dan tampak sangat inferior. Apalagi yang perlu ditakutkan dari ideologi yang sudah bangkrut itu?

****

Kita dapat belajar pula dari cara negara barat menghadapi perbedaan ideologi, termasuk komunisme. Dunia modern pun tidak dapat menghindari pluralisasi cara berpikir dan sikap politik. Berarti pluralisasi ideologi adalah suatu kondisi yang tidak terhindari akibat semakin kompleksnya masyarakat. Dengan demikian, seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya karena mempunyai keyakinan politik yang berbeda belaka. Namun jelaslah seseorang harus dihukum jika melakukan kekerasan politik, apapun ideologi yang diyakini.

Salah satu fungsi pemerintah, seperti yang dirumuskan Milton Friedman adalah melindungi warga dari paksaan dan kekerasan (coercion) pihak lain. Hukum dibuat sebagai aturan legal untuk melindungi kebebasan para warga. Memilih sebuah ideologi dan keyakinan, belum termasuk dalam kategori mengganggu atau melakukan paksaan. Di negara Barat, meyakini komunisme, sebagaimana meyakini kapitalisme, tidak termasuk tindakan kriminal. Namun sekali ideologi itu ingin diterapkan dengan menggunakan kekerasan dan melanggar konstitusi, ia akan dikenakan sanksi.

Agama yang diyakini absolut dan datang dari wahyu Tuhan saja tidak dipaksakan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an (2:256), bahwa tidak ada paksaan dalam agama, sejak jalan yang benar sudah terbedakan secara jelas dari jalan yang salah. Apalagi ideologi yang relatif diciptakan oleh para pemikir. Mengabsolutkan ideologi berarti membawa

ideologi setingkat dengan agama. Konsekwensinya harus diberikan kebebasan kepada setiap warga untuk memilih ideologinya sendiri.

Dokumen hak asasi manusia universal dengan jelas menyatakan bahwa manusia tidak boleh didiskriminasi hanya karena keyakinannya. Para pendiri bangsa kita, dalam UUD 45, juga tidak pernah menyinggung berlakunya diskriminasi kepada penganut ideologi tertentu. Mereka yang melakukan kejahatan kriminal dengan sendirinya harus dihukum. Namun ketika hukuman selesai, ia pulih kembali sebagai warga negara utuh yang tidak boleh dihilangkan hak politiknya.

Adalah sebuah tahayul jika kita meyakini aktivis komunis akan mampu membawa negara kita paska reformasi 1998 menjadi negara komunis dan mengganti sistem ekonomi atau konstitusi. Jika niat itu ada, mereka akan dilawan bukan saja oleh sebagian besar kekuatan masyarakat, namun oleh gerak sejarah itu sendiri. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dibalikkan lagi. Yaitu sejarah yang menuntut efisiensi ekonomi dan kebebasan politik, yang tidak dapat dipenuhi oleh ideologi komunisme itu.

Zaman sudah berubah. Ketimbang mengembangkan the Politics of Fear, lebih baik mendorong The Politics of Hope! Yaitu politik yang lebih berani bereksperimen dengan kebebasan dan persamaan (non-diskriminasi).

5

Demokrasi Butuh Pemimpin Demokrat

Para praktisi,ujar Howard Raiffa acapkali melakukan kekeliruan yang khas: memecahkan masalah dengan pertanyaan yang salah. Dalam public policy, kesalahan ini dinamakan the error of the third type. Walaupun jawaban yang diberikan benar, namun problem tetap tidak terpecahkan, karena pertanyaan yang diajukan ternyata salah.[20]

Pertanyaan yang berbunyi, misalnya, "Apakah presiden mendatang sebaiknya dari sipil atau militer", dapat dikategorikan ke dalam the error of the third type. Jawabannya tidak memecahkan satu problema politik yang penting di tanah air. Tidak juga problema hubungan sipil – militer.

20 Dikutip dari William N Dunn: Public Policy Analysis (USA: Prentice Hall Ine, 1994), hal 140.

Karl Popper dapat menjelaskan kesalahan ini lebih filosofis dari sisi sejarah pemikiran politik. Dari Plato hingga Karl Marx, ujarnya, pertanyaan fundamental dalam politik yang selalu diajukan adalah, “siapa yang seharusnya memerintah?” [21]

Plato membagi sistem pemerintahan berdasarkan pertanyaan itu dari segi jumlah yang memerintah. Jika yang memerintah tersentralisir di tangan satu orang, ia menamakannya monarki. Bentuk terburuk dari monarki adalah tirani. Jika sebagian orang yang memerintah, ia menamakannya aristokrasi. Bentuk terburuk dari aristokrasi adalah oligarki. Jika yang memerintah adalah rakyat kebanyakan, ia menamakannya demokrasi. Karena mayoritas cenderung berbuat kerusuhan, ujar Plato, maka demokrasi memburukkan dirinya sendiri.

Setelah menguraikan pemerintahan, yang seharusnya memerintah, ujar Plato, adalah yang sedikit dan terbaik. Mereka adalah kaum aristokrasi yang berkualitas the philosopher kings.

Banyak pemikir yang tidak menyetujui jawaban Plato namun mereka tetap mengajukan pertanyaan yang sama, “siapa yang seharusnya memerintah?” Marx menjawab: kaum buruh! Khomeini menjawab: para ulama. Galbraith memilih kaum teknokrat. Peter Drucker menunjuk kelompok manajer. Di Tanah Air, sebagian kita menjawab: kaum sipil, sebagian lagi berseru: sebaiknya dari militer.

---

21 Majalah Economist 23 April 1998: Popper on Democracy.

Bukankah siapapun yang memerintah selalu mempunyai kemungkinan salah, tanya Karl Popper. Bahkan sistem demokrasi, yang berlandaskan suara mayoritas pemilih umum, dapat memilih seorang diktator. Hitler terpilih secara demokratis di Jerman dan menyulut perang dunia.

Teori yang baru, lanjut Popper, harus mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi, "siapa yang seharusnya memerintah?", namun "bagaimana menciptakan sistem, sehingga pemimpin yang membuat kesalahan dapat dikoreksi dan diturunkan dari jabatannya secara terlembaga dan tanpa kekerasan". Mekanisme seperti ini dapat menghindari kemungkinan sang pemimpin membuat kesalahan yang lebih besar.

Siapapun yang berkuasa tidak lagi menjadi problema sejauh ia dapat dikoreksi, apakah ia ilmuwan dan praktisi, buruh atau pengusaha, ulama atau seniman, sipil dan militer. Debat siapa yang seharusnya memerintah menjadi hak relevan dalam rangka kerangka teori Karl Popper.

Tapi sebuah lagu yang baik memerlukan penyanyi yang merdu. Walaupun lagunya baik, namun jika penyanyinya buruk, nada yang terdengar cukup mengganggu telinga. Hanya kombinasi lagu baik dan penyanyi merdu yang membuat sebuah nyanyian terdengar indah di telinga pendengar. Karenanya, Popper mungkin terlalu ekstrem. Tipe dan karakteristik pemimpin tetap penting, walau tingkat kepentingannya

berada di belakang pembentukan sistem yang self-correcting.

Sungguhpun sistem yang diutamakan, tipe dan karakter kepemimpinan tetap tidak perlu menjadi unsur yang dapat dinihilkan. Ia dapat mengejawantahkan sistem secara benar, bahkan lebih baik, atau justru dapat merusaknya.

Sistem demokrasi, sebagai misal, hanya dapat bertahan lama jika si pemimpin meyakini dan hidup dalam kulturnya. Para founding fathers kita sudah bicara mengenai pentingnya spirit penyelenggara pemerintahan. Fukuyama juga berbicara tentang pentingnya "dunia ide" yang diyakini pemimpin. Terlebih lagi dalam sistem yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi seperti di dunia ketiga, peran pemimpin cukup besar.

6
Melembutkan Kekuasaan

Ketika melintas dekat bukit Thai, Kongfusius melihat seorang wanita sedang menangis terisak-isak di sisi sebuah kuburan. Sang guru dengan segera membelokkan rombongannya dan mendekati orang itu. Ia menitahkan rekan seperjalanannya, Tze Lu, mencari tahu apa yang terjadi.

Tampaknya ibu sedang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, ujar Tze Lu. Itulah yang sedang aku alami, isak sang ibu. Suatu ketika ayah suami saya dibunuh oleh seekor harimau di sini. Suami saya juga dibunuh dan kini anak saya yang lelaki telah mati cara yang sama. Sang guru pun bertanya: Lalu mengapa ibu tidak pindah ke tempat lain sejak dulu? Jawab wanita itu: Di sini tidak ada pemerintah yang menindas. Setelah sejenak terdiam, sang guru memberi petuah kepada

murid-murid yang menyertainya: Renungkanlah anak-anakku, pemerintah yang menindas lebih mengerikan daripada harimau.

Kita tidak tahu apakah kisah ini benar-benar terjadi. Tapi Bertrand Russel menceritakannya kembali kepada kita dengan pesan yang jelas.[22]Ketakutan akan pemerintahan yang sewenang-wenang sangat dalam. Ibu itu memilih tinggal di daerah yang banyak harimaunya ketimbang di wilayah kekuasaan yang menindas.

Rasa takut akibat beroperasinya kekuasaan yang tidak terduga dan menekan adalah salah satu problem abadi dalam politik. Berbeda dengan reaksi ibu di atas, filsafat politik tidak lari dari jangkauan kekuasaan yang menindas. Berbagai filsafat politik pada dasarnya adalah dokumen intelektual untuk menjinakkan kekuasaan.

Pada awalnya Plato, filsuf yang lahir sekitar 300 tahun sebelum Nabi Isa dan 900 tahun sebelum Nabi Muhammad, mengutarakan masyarakat dapat merasa aman dan berkembang biak, jika pemerintahan dipimpin oleh sedikit orang-orang bijak. Dalam bahasa Plato, mereka adalah the Philosopher King, para pemimpin yang terlatih dengan filsafat dan memancarkan kearifan.

Sebuah pemerintahan sudah kadung memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ia lembaga satu-satunya yang dapat bergerak mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Ia satu-satunya lembaga yang boleh

22. Bertrand Russel, Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru (Jakarta: Yayasan Oboe, 1988).

menggunakan kekerasan, memonopolinya, dalam pengaturan sosial. Bagi Plato, di tangan benevolent leaders, lembaga ini akan mengutamakan kepentingan dan keadilan masyarakat yang diperintah. Kekuasaan dapat dijinakkan.

Dua ribu tahun setelah Plato, kita menyadari betapa salahnya membangun masyarakat hanya bersandarkan kepada kebaikan hati para pemimpin. Tak pernah pasti, bagaimana sebuah pemerintahan secara kontinu dapat dijabat hanya oleh orang-orang bijak. Ketika selesai era kepemimpinan sebuah generasi yang bijak, kemudian datang lagi generasi pemimpin lain yang menggantikannya. Pasti bijakkah mereka?

Sejarah menunjukkan, bahkan orang-orang kudus pun dengan kekuasaan yang besar, dapat kejam. Perang terpanjang dan emosional dalam sejarah justru perang agama, perang salib di abad pertengahan. Dua agama yang punya misi menyebarkan kebenaran, di tangan penganutnya yang buta tetapi sangat berkuasa, dapat saling membunuh dan memusnahkan.

Lebih susah lagi membayangkan bagaimana pemimpin yang bijak dapat naik ke jenjang kekuasaan tertinggi. Politik praktis begitu keras. Ia mampu merangsang manusia menyimpan motif dan rencana terburuk yang dapat ia punyai. Dengan penuh idealisme ia masuk ke dunia politik, namun dunia praktis dengan mudah melunturkannya. Di samping itu, bagaimana mungkin manusia dapat menjadi baik jika ia begitu berkuasa?

****

Pilihan yang lebih mungkin untuk menjinakkan kekuasaan adalah memberlakukan konstitusi secara konsekwen. Dua substansi menjadi pokok konstitusi. Ia mencegah sentralisasi kekuasaan, sekaligus menjamin kebebasan.

Carl J. Frederich bercerita tentang banyak tentang konstitusi. Kebaikan utama konstitusi karena ia merubah corak pemerintahan, dari pemerintahan orang perorang menjadi pemerintahan hukum. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada figur tertentu tetapi pada hukum yang impersonal. Tak ada pemerintahan yang sah jika tidak bersandarkan pada hukum. Dan sumber hukum sebuah negara itu adalah konstitusi.

Konstitusi modern lahir sebagai reaksi dari abad pertengahan, ketika kekuasaan politik ekonomi tersentralisasi di tangan satu raja, dan kemudian bersatu dengan penguasa agama. Jika kekuasaan politik, ekonomi dan agama berada dalam satu oligarki yang berkolusi, apalagi yang tersisa bagi kelompok di luar oligarki itu? Kita tahu pula kekuasaan itu punya kecenderungan menyeragamkan dan menundukkan pihak lain dalam dominasinya. Pihak yang ingin berada di luar kerangka itu, akan dilindasnya. Karena kekuasaan itu begitu besar siapa yang mampu keluar dari lilitannya?

John Locke meradang. Baginya, unit tertinggi masyarakat bukanlah pemerintahan tetapi individu. Pemerintahan dibuat bagi kepentingan berbagai

individu di dalamnya, bukan sebaliknya. Setiap individu memiliki hak-hak yang tidak dapat dilanggar. Hak-hak itu seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik, adalah pemberian alam yang tidak dapat diambil-alih oleh sebuah pemerintahan. Pemerintah yang gagal mengakui hak ini dengan sendirinya kehilangan legitimasi sebagai pemerintahan yang sah. Kemudian hari, hak yang dirumuskan John Locke berkembang menjadi konsep hak asasi yang kita kenal sekarang.

Montesquie pun memecahkan kekuasaan pemerintah yang tersentralisasi dari satu kekuasaan absolut di tangan raja ke berbagai lembaga yang terpencar. Kekuasaan yang membuat undang-undang (legislatif), harus terpisah dari kekuasaan yang memberlakukan undang-undang itu (eksekutif). Kekuasaan yang memberlakukan undang-undang harus terpisah pula dari kekuasaan yang mengadili pelanggar undang-undang (yudikatif). Tiga kekuasaan itu sama tinggi, saling melengkapi, dan tidak berada dalam dominasi satu kekuatan.

Dalam perkembangannya, Hamilton, dengan bantuan Madison dan Jay, melengkapi kewenangan yudikatif dengan judicial review. Karena konstitusi ini memang dibuat sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, maka pihak yang paling potensial melanggar konstitusi adalah pemerintah sendiri. Judicial Review menjadi hak yudikatif untuk menilai apakah produk pemerintahan, seperti hukum yang dibuat oleh legislatif, telah melanggar prinsip konstitusi.

Praktek politik, terutama di negara berkembang, kerap berbelok dari konstitusi negaranya sendiri. Dalam konstitusi sebagai misal, dijamin adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun dalam peraturan pelaksanaannya terjadi pembatasan yang menentang spirit konstitusi. Judicial Review dibuat untuk mengantisipasi hal ini, dan menjaga agar konstitusi tetap dihormati sebagai dokumen yang membatasi tindak-tanduk pemerintahan.

Kekuasaan pemerintah kemudian diperkecil lagi dengan berkembangnya paham laizzes faire. Paham ini menginginkan pemerintah membiarkan masyarakat mengatur dirinya sendiri, dan hanya mengambil peran jika masyarakat itu memang tidak mampu melakukannya. Konstitusi merubah slogan dari government knows best menjadi individuals know better.

****

Agak mengherankan, ada yang terbalik dari cara kita memberlakukan konstitusi di tanah air,terutama di era Orde Baru. Label tidak konstitusional atau harus menaati konstitusi acap disampaikan oleh pihak resmi untuk mengidentifikasi kegiatan masyarakat yang dianggap berbeda dari kebijakan resmi. Hal ini dapat melupakan kenyataan, bahwa konstitusi itu dibuat justru untuk mengontrol kekuasaan pemerintah sendiri. Di negara demokrasi, label itu menjadi alat masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahnya, bukan sebaliknya.

Sejarah konstitusi adalah sejarah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin kebebasan warganegara. Indonesia baru paska gerakan reformasi 1998 mesti ditegakkan dalam paradigma demokrasi konstitusional. Di sanalah terletak tanah harapan.

7
Ruang Yang Luas untuk Perjuangan Politik

Politik bukanlah akuarium. Dalam dunia politik, tidak segala hal terlihat jelas, sebagaimana di akuarium. Gerak-gerik ikan di akuarium dapat diamati dan responnya dapat juga dilihat sejernihnya. Tapi masyarakat politik selalu memberi ruang bagi kejutan, kekaburan, misteri. Di medan politik dapat saja tiba-tiba situasi berbalik, di luar dugaan siapapun.

Setahun sebelum bubarnya Uni Soviet, siapakah yang menduga terjadinya peristiwa tersebut? Uni Soviet saat itu masih menjadi satu superpower yang memimpin separuh dunia. Memang diketahui adanya krisis ekonomi yang melanda negara itu. Namun pembubaran negara Uni Soviet berada di luar dugaan pengamat manapun.

Dua puluh tahun yang lalu, pengamat politik mana yang dapat menduga agama akan bangkit dan

kembali mewarnai dunia publik negara paling sekuler seperti Amerika Serikat? Para sosiolog, terutama yang diromantisir oleh kecemerlangan akal budi dan ilmu pengetahuan, sejak lama memberi membuat. Dunia agama dianggap sudah menjadi sejarah, yang tidak lagi memainkan peran berarti. Tempatnya telah digantikan oleh sejenis humanisme sekuler, yang diperkaya oleh renungan ilmiah. Kini agama itu ternyata hidup lagi.

Ada sebuah nyanyian rakyat Cina. Satu baitnya mengatakan, bumi sangat besar, matahari lebih besar, namun manusia lebih besar lagi. Ia menyimpan potensi yang tidak seluruhnya dapat dielaborasi. Kekayaan dimensi ini tidak akan pernah mampu ditangkap sepenuhnya oleh analisis politik apapun.

Karena itu setiap penjelasan dan prediksi politik, baik yang ilmiah apalagi tidak, sudah mengandung kemungkinan salah. Satu contohnya adalah mengaitkan prospek demokrasi di Indonesia dengan jumlah kelas menengah.

Paham itu mengatakan demokrasi di Indonesia masih impian. Salah satu hambatan terwujudnya demokrasi di Indonesia adalah belum terbentuknya kelas menengah yang mandiri dalam jumlah yang memadai, dan tersebar di seluruh wilayah negeri ini.

Kondisi Indonesia dianggap berlainan dengan Taiwan dan Korea Selatan, yang dalam waktu relatif singkat mencapai tahapan demokrasi. Di kedua Negara itu, dalam waktu yang relatif singkat terbentuk kelas

menengah yang mandiri, kuat dan dalam jumlah yang memadai.

Adapun yang dimaksud dengan kelas menengah, tidak hanya para pengusaha. Tapi semua orang terdidik yang tidak bekerja di pemerintahan, dan memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah. mereka bisa saja terdiri dari para profesional, dan tenaga kerja terdidik. Jumlah kelompok ini meski lebih banyak dari 20 tahun yang lalu, tetapi belum memadai untuk tampil menggerakkan demokratisasi. Benarkah paham yang deterministik ini?

****

Satu hal yang pasti, analisa itu tidak memberi efek yang positif bagi tuntutan demokratisasi yang masih semarak di Tanah Air, apalagi paska gerakan reformasi 1998. Jika demokrasi hanya terjadi ketika jumlah kelas menengah memadai, lalu apa gunanya mendengung-dengungkan demokrasi sekarangan ini? Bukankah hasilnya akan sia-sia belaka? Siapa pula yang bersedia dan tertarik berkeringat untuk sebuah kesia-siaan?

Lebih jauh analisa itu dapat menjadi justifikasi ilmiah bagi belum diselenggarakannya demokrasi. Ditundanya demokrasi menjadi benar secara akademik, dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Melawan penundaan demokrasi berarti menentang sebuah kesimpulan ilmiah. Dan kita tahu, melawan kesimpulan ilmiah secara moral terasa berat.

Karenanya, beberapa catatan kritis perlu diberikan. Paham ini telah memandang demokrasi dari sudut pandang yang tunggal dan sangat terbatas. Demokrasi hanya dikaitkan dengan tersedianya jumlah kelas menengah yang memadai, yang independen dari pemerintah.

Argument ini lemah, baik ditinjau dari pengalaman empiris ataupun dari perspektif teoritik lain. Kita pernah bereksperimen dengan demokrasi, di era demokrasi parlementer, tahun lima puluhan. Prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berserikat, beropini, pluralitas ideologi dan partisipasi politik terselenggara secara memadai. Padahal jumlah kelas menengah empat puluhan tahun lalu itu jelas lebih sedikit dari yang ada saat ini. Berarti sebuah pemerintahan demokratis dan jumlah kelas menengah tidaklah berhubungan secara otomatis, seperti semakin banyak jumlah kelas menengah semakin demokrasi terlaksana. Bukti ini sendiri sudah cukup untuk menggugurkan paham itu.

Eksperimen demokrasi itu memang gagal. Kabinet jatuh bangun dalam tempo yang cepat. Ketidakstabilan politik mengganggu program ekonomi jangka panjang. Mengapa sistem itu gagal? Banyak analisa sudah dibuat, seperti menangnya politisi bertipe solidarity makers atas tipe administrative, intervensi sengaja kekuatan politik yang tidak memiliki kekuasaan riel dalam sistem itu, tidak dihayatinya kultur demokrasi di kalangan elit maupun tidak terakumulasinya kapital dalam negeri.

Paham deterministik itu juga mengekspresikan pandangan yang sangat parsial atas kesadaran manusia. Pendukung dan pejuang demokrasi dipatoknya hanya di kalangan kelas menengah, yang independen dari pemerintah. kesadaran seseorang seolah hanya ditentukan oleh posisi sosialnya. Di luar kelas menengah yang independen, apakah hanya ada kebisuan?

Pandangan ini melupakan kemungkinan bahwa setiap individu apapun posisi sosialnya dapat dirubah menjadi agen, yang dapat turut berjuang dan menegakkan demokrasi. Mereka dapat berasal dari massa rakyat banyak yang bukan bagian kelas menengah, ataupun berbagai faksi dari tubuh pemerintahan sendiri.

Kesadaran politik, sebagaimana kesadaran agama mungkin lebih misterius dari yang kita duga. Ia dapat menyatukan berbagai individu di berbagai kelas dan posisi sosial yang berbeda, melawan kesadaran pihak lain dari kelas dan posisi yang sama. Raja Constantine datang dari tradisi Romawi yang membunuh dan memburu penganut Kristen. Ia kemudian berubah menjadi penganut Kristen yang saleh dan mendukung penyebarannya.

Kemungkinan perubahan kesadaran seperti ini sangat penting untuk dihitung. Kemungkinan itu riel dan dibutuhkan. Ruang sosial bagi penyebaran pengaruh menjadi sangat luas. Setiap upaya penyadaran untuk demokratisasi berharga dilakukan, karena mengasumsikan adanya aktor atau kelompok-kelompok

politik penting, yang berubah kesadaran lalu mendukung gerakan demokratisasi.

Bahkan gerakan demokratisasi dapat diperkuat oleh mereka yang tidak benar-benar menyetujui prinsip itu. Katakanlah terjadi perpecahan di pemerintahan yang anti demokrasi. Berbagai pihak mencari dukungan luar, menawarkan konsensi. Selalu mungkin terjadi, perpecahan ini berakhir pada perubahan sistem yang mendasar ke arah demokratisasi.

****

Aktivis berbeda dengan pengamat, yang sejak awal memang berpretensi netral dan obyektif walaupun keduanya dilengkapi oleh kemampuan akademik dan intelektual yang sama. Yang diutamakan oleh seorang aktivis adalah implikasi praktis dan politis, sedangkan penjelasan akademis datang kemudian.

Dalam ilmu sosial tersedia begitu banyak teori dan model analisis. Berbagai model analisis itu bukan saja dapat memberikan kesimpulan yang berbeda atas kenyataan, tetapi dapat pula memberikan efek politik yang salin berlawanan.

Sebuah analisa adalah variable social yang turut membentuk realitas selanjutnya. Sebagaimana sebuah bahasa, ia bukan saja berkekuatan menjelaskan realitas, tetapi dapat pula mempengaruhi bentuk realitas baru.

Tak ada yang netral dalam teori ataupun model analisis. Bahkan statistik pun dapat hanya menjadi the

politics of numbers. Angka dalam statistic (yang benar) memang menjelaskan realitas yang ada. Tapi angka itu dicari, dibuat dan ditemukan untuk menjelaskan sebuah problem. Sedangkan problem itu dirumuskan dan dipilih secara politis, karena dari masalah yang sama dapat dirumuskan problem yang berbeda.

Memilih sebuah model analisis, lalu berujung pada kesimpulan "demokrasi di Indonesia masih menjadi impian" dapat dipersoalkan dan dikritik secara akademis. terlebih lagi ia harus dikritik untuk kepentingan politik praktis.

Ruang untuk bermanuver begitu luasnya, lebih luas daripada batasan-batasan yang diberikan oleh sebuah teori akademis. Reformasi menuju demokrasi memang telah digulirkan dan berbuah jatuhnya Soeharto. Namun sistem demokratis belum sepenuhnya terlaksana. Perjuangan reformasi belum selesai. Adalah tugas generasi baru sekarang ini untuk turut menuntaskannya.

DAFTAR PUSTAKA

Diamond, Larry et.al., Democracy in Developing Countries, Asia, (USA: Lyne Rinner, Inc, 1978)

______, Toward Democrati Consolidation", Journal of Democracy, Vol. 5., July 1994

Dunn, William N., Public Policy Analysis (USA: Prentice-Hall Inc., 1994)

Dye, Thomas R. and Harmon Zeigler, The Irony of Democracy (USA: Brooks/ Cole Publishing Company, 1990)

Friedman, Milton and Rose, Free to Choose: A Personal Statement (New York: Harcourt Brace Janovich, 1990)

______, Freedom and Capitalism (USA: University of Chicago, 1982)

Gray, John, Liberalism: essay in Political Philosophy (London: Routledge, 1990)

Huntington, Samuel, "A New Wave of Democracy, Religion and Global Democracy", Current, December 1991.

Kingdon, John, W., Agendas, Alternatives and Public Policies (USA: Harper Collins, 1984).

Liddle, William R., Leadership and Culture (USA: Allen & Unwin Pty, Ltd., 1996)

Lipset, Seymour M., Political Man : Social Base of Politics (New York: Anchor, 1963).

Lubis, Mulya T.,In Search of Human Rights (Jakarta: Gramedia, 1993).

Najjar, Fauzi M., “The Debate on Islam and secularism in Egypt”, Arab Studies Quarterly, Vol. 18, No.2 Spring 1996.

Ravith, Diane (ed.),The Democracy Reader (USA: Harper Perenial, 1992)

Robertson, David, A Dictionary of Modern Politics (Philadephia: Taylor and Francis,1985).

Russel, Bertrand, Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Baru (Jakarta: Yayasan Obor,1988).

Sandel, Michael, Liberalism and It’s Critics (USA: New York University Press, 1984)

Stone, Deborah, Policy Paradox and Political Reason (USA: Harper Collins, 1988).

Sundhausen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Jakarta: LP3ES, 1982).

DAFTAR BUKU DENNY J. A

1. *Democratization From Below Protest Events And Regime Change In Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. *The Role Of Government In Economy And Business*, Penerbit LKIS, 2006
3. *Various Topics In Comparative Politics*, Penerbit LKIS 2006
4. *Demokrasi Indonesia: Visi Dan Praktek* (Kumpulan Tulisan di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
5. *Jalan Panjang Reformasi* (Kumpulan Tulisan di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. *Melewati Perubahan*, Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan di Jawa Pos dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. *Politik Yang Mencari Bentuk* (Kumpulan Kolom di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. *Membangun Demokrasi Sehari-Hari* (Kumpulan Tulisan di Media Indonesia), Penerbit, LKIS 2006
9. *Partai Politik Pun Berguguran* (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. *Manuver Elit, Konflik Dan Konservatisme Politik* (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS 2006

11. *Para Politisi Dan Lagunya* (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006
12. *Memperkuat Pilar Kelima*, Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006
13. *Visi Indonesia Baru Setelah Reformasi 1998*, Penerbit LKIS 2006
14. *Catatan Politik*, Penerbit LKIS 2006
15. *Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi*, Penerbit LKIS 2006
16. *Membaca Isu Politik*, Penerbit LKIS 2006
17. *Gerakan Mahasiswa Dan Politik Kaum Muda Era 80-An*, Penerbit LKIS 2006
18. *Election Watch : Meretas Jalan Demokrasi* (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
19. *Parliament Watch: Eksperimen Demokrasi: Dilema Indonesia* (Talkshow Denny J.A. di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. *Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia* (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Akrual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. *Jejak-Jejak Pemilu 2004* (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006